KAIMANTAN BARAT
INDONESIA

BUKU PROGRAM

Technical Exchange 2026



Daftar Isi

Pengantar GCF Task Force 01

Latar Belakang Kegiatan 03

Agenda 05

Seruan Inisiatif 07

Deksripsi Sesi 08

- Inisiasi bersama: Upaya Restorasi dan Konservasi 09
- Kemitraan Pemerintah-Swasta di Kalimantan Barat 13
- Memanfaatkan Pasar untuk Melindungi Infrastruktur Alam: Mekanisme Pasar Karbon dan Solusi Berbasis Alam 17
- NDPE untuk Komoditas Berkelanjutan 21

Bertemu Para Delegasi 26

Bertemu Para Mitra 42

Pengantar
GCF Task Force

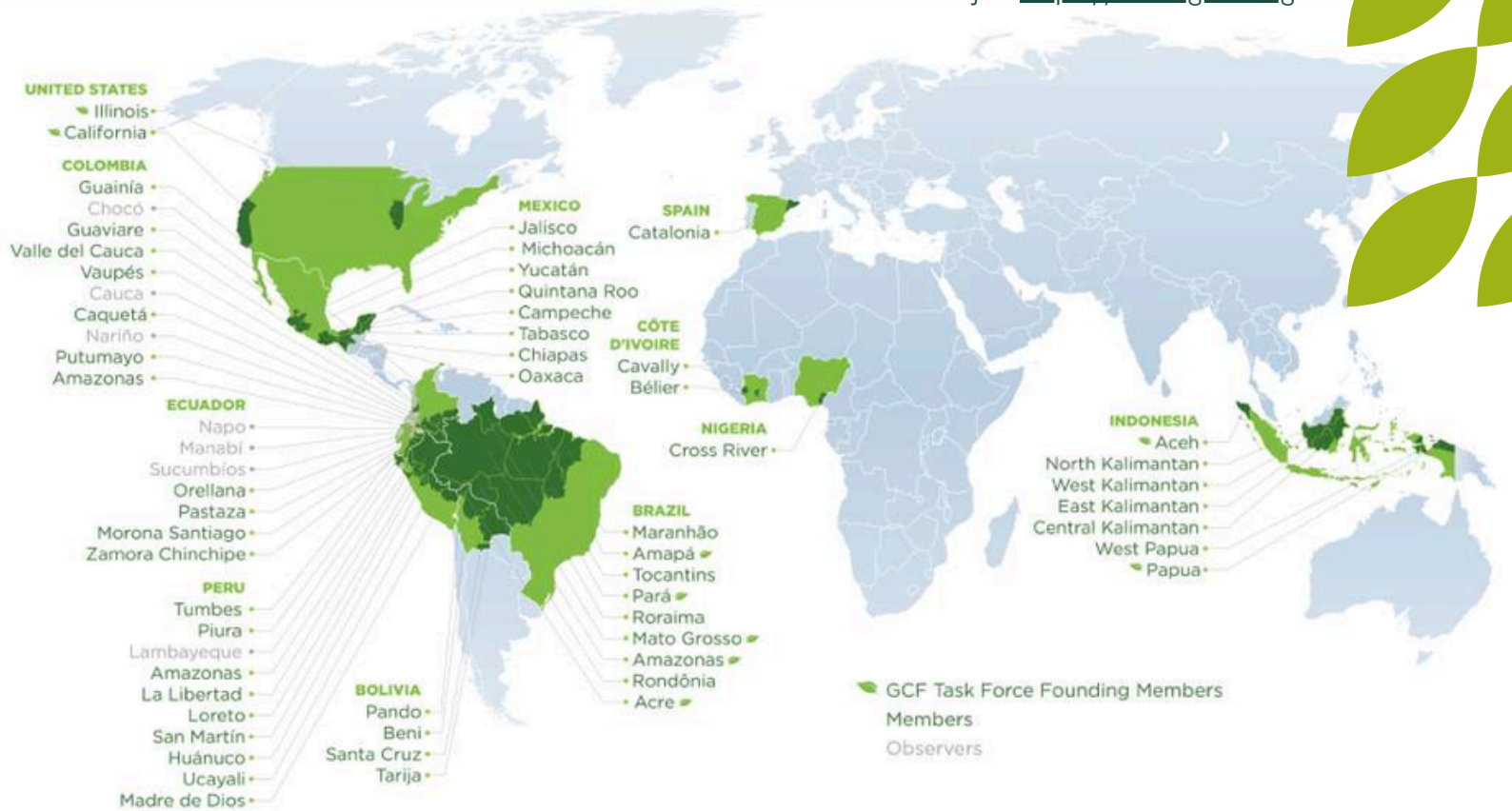
Governors' Climate and Forests Task Force (GCF Task Force) merupakan jaringan pemerintah subnasional terbesar di dunia yang berfokus pada hutan dan iklim. Didirikan pada tahun 2008, jaringan ini mempertemukan negara bagian dan provinsi di berbagai wilayah hutan tropis utama untuk melindungi hutan, mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Saat ini, GCF Task Force terdiri atas 54 negara bagian dan provinsi di 11 negara, yang secara kolektif mewakili lebih dari sepertiga hutan tropis dunia.

GCF Task Force menyediakan wadah bagi pemerintah subnasional untuk bertukar pengetahuan, memperkuat kebijakan iklim dan kehutanan, memobilisasi pembiayaan, serta mengembangkan solusi praktis untuk konservasi hutan dan pembangunan rendah emisi.

Kegiatannya juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, masyarakat sipil, serta sektor swasta, dengan mengakui bahwa aksi iklim dan kehutanan yang efektif memerlukan kolaborasi lintas sektor. Melalui keterlibatan politik, pendekatan yurisdiksi, pendanaan inovasi, dan pertukaran pengetahuan, GCF Task Force mendukung para anggotanya dalam menerjemahkan komitmen iklim dan kehutanan menjadi aksi nyata di lapangan.

Pada tahun 2022, GCF Task Force meluncurkan konsep New Forest Economy, yaitu sebuah visi bahwa hutan yang tetap berdiri dan lanskap yang telah dipulihkan dapat menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan melalui komoditas berkelanjutan, jasa ekosistem, pasar karbon, dan berbagai model usaha berbasis alam lainnya.

Info lebih lanjut: https://www.gcftf.org



GCF Task Force Introduction

Technical Exchange ini akan diikuti oleh dua anggota Sekretariat Global GCF Task Force, yaitu Jason Gray dan Akane Nishimura, yang akan berkontribusi dalam pertukaran pengalaman dan mendukung diskusi sepanjang kegiatan.





Jason Gray
Sekertariat GCF Task Force – UCLA

Jason Gray adalah Direktur Proyek Governors' Climate and Forests Task Force (GCF Task Force) yang berbasis di UCLA Emmett Institute on Climate Change and the Environment. Sebagai ahli hukum lingkungan dan kebijakan iklim, sebelumnya ia memimpin Program Cap-and-Trade California di California Air Resources Board (CARB), yang mengawasi salah satu pasar karbon paling berpengaruh di dunia

Ia memiliki pengalaman luas dalam tata kelola iklim, pasar karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan hukum lingkungan internasional. Dalam perannya saat ini, ia memimpin Sekretariat GCF Task Force dalam memperkuat kolaborasi antarpemerintah subnasional untuk mendorong konservasi hutan, pembangunan berkelanjutan, dan pertumbuhan ekonomi rendah emisi.

Akane Nishimura
Sekertariat GCF Task Force – UCLA

Akane Nishimura, Ph.D. adalah seorang ahli ekologi yang menjabat sebagai Program Associate bidang Impact Assessment pada Sekretariat Governors' Climate and Forests Task Force (GCF Task Force) di UCLA. Penelitian doktoralnya di Kalimantan Tengah mengkaji suksesi hutan, siklus kebakaran, dan perubahan iklim pada hutan tropis yang sangat terdegradasi dan didominasi oleh rumput serta pakis invasif.

Ia memiliki keahlian dalam ekologi hutan tropis dan minat kuat untuk bekerja bersama Masyarakat Adat, masyarakat lokal, dan kelompok marjinal lainnya. Akane memperoleh gelar B.A. dalam Kimia Lingkungan dari UC San Diego serta gelar M.S. dan Ph.D. dalam Ekologi dan Biologi Evolusi dari UCLA.

Latar Belakang Kegiatan

Pencapaian hasil konservasi dan restorasi yang bermakna pada skala yurisdiksi membutuhkan keterlibatan aktif dan berkomitmen dari sektor swasta, bukan sebagai aktor pendukung semata, tetapi sebagai mitra utama dalam tata kelola, pembiayaan, dan implementasi. Yurisdiksi anggota Governors' Climate and Forests Task Force (GCF Task Force) telah lama menyadari bahwa pendanaan publik saja tidak dapat menutup kesenjangan investasi yang diperlukan untuk menghentikan deforestasi, memulihkan lanskap terdegradasi, dan mendukung penghidupan yang tangguh terhadap perubahan iklim di wilayah hutan tropis yang luas.

Sektor swasta—yang mencakup perusahaan komoditas, lembaga keuangan, koperasi petani kecil, penyedia data dan jasa, serta investor berdampak—tidak hanya membawa modal, tetapi juga pengaruh terhadap rantai pasok, akses pasar, dan kapasitas operasional yang tidak dapat direplikasi oleh lembaga pemerintah secara mandiri. Dalam konteks inilah konsep New Forest Economy menjadi kerangka yang kuat: sebuah visi tentang masa depan di mana hutan yang tetap berdiri dan lanskap yang telah dipulihkan menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan melalui komoditas berkelanjutan, jasa ekosistem, pasar karbon, dan usaha berbasis alam, sehingga konservasi menjadi kompetitif secara finansial dibandingkan konversi lahan. Visi ini telah mulai diwujudkan di yurisdiksi anggota GCF Task Force melalui berbagai model konkret; karena itu, membangun New Forest Economy bukan sekadar ambisi lingkungan, melainkan sebuah sistem ekonomi baru yang secara aktif dibangun oleh anggota GCF Task Force dari tingkat dasar.

Kalimantan Barat, yang memiliki sebagian hutan paling kaya keanekaragaman hayati dan karbon di Borneo, telah menjadi arena penting bagi keterlibatan sektor swasta dalam konservasi dan restorasi. Perekonomian provinsi ini sangat terkait dengan produksi komoditas,- khususnya kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan kayu, sehingga sektor swasta menjadi salah satu pendorong utama deforestasi sekaligus mitra yang diperlukan untuk membalikkan kondisi tersebut. Perusahaan kelapa sawit besar yang beroperasi di wilayah ini semakin banyak berkomitmen terhadap kebijakan No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) - yang mengubah cara mereka melakukan pengadaan dan mengelola rantai pasok. Perusahaan swasta juga semakin terlibat dalam upaya restorasi gambut karena menyadari bahwa lahan gambut terdegradasi menimbulkan risiko kebakaran dan liabilitas karbon yang signifikan bagi operasional mereka. Program yang didanai Green Climate Fund di Kalimantan Barat (FP248) semakin melembagakan tanggung jawab sektor swasta dengan menempatkan rantai pasok komoditas berkelanjutan sebagai salah satu pilar utama kerangka tata kelola penggunaan lahan provinsi.



Latar Belakang Kegiatan

Mewujudkan New Forest Economy membutuhkan lebih dari sekadar menarik investasi swasta; diperlukan berbagai skema yang memungkinkan sektor swasta berperan sebagai mitra, bukan hanya sebagai pendukung. Untuk mengeksplorasi berbagai pilihan keterlibatan sektor swasta dalam upaya konservasi dan restorasi di yurisdiksi GCF Task Force, Technical Exchange "Public-Private Partnerships in Conservation and Restoration" akan diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, pada 8–10 September 2026, dengan Kalimantan Barat sebagai tuan rumah. Pertukaran ini akan mempertemukan anggota GCF Task Force terpilih, yurisdiksi non-anggota yang diundang dari Asia Tenggara, organisasi mitra dan donor, serta pelaku sektor swasta. Melalui sesi pleno, berbagi pengalaman, dan diskusi kelompok, termasuk pertukaran dengan perwakilan pemerintah kabupaten, peserta akan mengeksplorasi berbagai pendekatan untuk membangun kemitraan, memobilisasi pembiayaan, dan memperkuat model ekonomi berkelanjutan untuk pengelolaan hutan dan lanskap.

> *__Tujuannya__ adalah Technical Exchange ini diharapkan dapat menyajikan berbagai pilihan yang layak bagi keterlibatan sektor swasta dalam program konservasi dan restorasi yurisdiksi GCF Task Force, serta program berbasis masyarakat mengenai cara melembagakan pilihan-pilihan tersebut, termasuk kekuatan dan tantangannya.*

Agenda

Rabu, September 9

08:00 - 08:30	Registrasi
08:30 - 09:30	Sesi Pembuka
09:30 - 12:00	Sesi 1 **Inisiasi bersama: Upaya Restorasi dan Konservasi**
12:00 - 13:00	Break Makan Siang
13:00 - 14:00	Supporting Mitigation and Adaptation through BLUD
14:00 - 17:00	Sesi 2 **Inisiatif Kemitraan Publik-Swasta di Kalimantan Barat**
19:00 - 21:00	Sambutan Makan Malam - Novotel Bogor

Kamis, September 10

08:00 - 08:30	Registrasi
08:30 - 12:00	Sesi 3 **Memanfaatkan Pasar untuk Melindungi Infrastruktur Alam: Pasar Karbon dan Mekanisme Solusi Berbasis Alam**
12:00 - 13:00	Break Makan Siang
13:00 - 16:00	Sesi 4 **NDPE untuk Komoditas Berkelanjutan**
16:00 - 16:30	Penutupan

The Agenda

Working Sessions 1
Inisiasi bersama: Upaya Restorasi dan Konservasi

Waktu
Rabu, Sept 9 2026 (09.30 - 12.00 WIB)

Topik
Pengalaman dan Pendekatan Restorasi dan Konservasi di Berbagai Yurisdiksi dan Organisasi

Moderator
- Herlina Hartanto (YKAN)
- Maria Calvo (Bolivia)

Pembicara:
- **Herencia Maya in Yucatan**
  Neyra Silva (Yucatan, Mexico)
- **Produce Conserve and Include (PCI) Project in Mato Grosso**
  Alex Marega (Mato Grosso, Brazil)
- **Conservation Fund in Tarija**
  Gonzalo Avilla (Tarija, Bolivia)
- **Crown Jewel of Papua**
  Prof. Charlie Heatubun (Papua Barat, Indonesia)
- **Amazon Future Fund**
  Bruno Paladines (Ekuador)

Working Sessions 2
Inisiatif Kemitraan Publik-Swasta di Kalimantan Barat

Waktu
Rabu, Sept 9 2026 (14.00 - 17.00 WIB)

Topik
Menampilkan Inisiatif Kemitraan Publik-Swasta di Kalimantan Barat

Moderator
- Haryono Sirait (CDP)
- Eric Natanael (Harapura)

Pembicara:
- **Proyek Green Climate Fund**
  Adi Yani (West Kalimantan, Indonesia)
- **Cagar Biosfer Mata Pandawa**
  Prof. Farah Diba (Tanjungpura University)
- **Inisiatif Konservasi Berbasis Masyarakat**
  Fajri Nailus Subchi (Sampan Kalimantan)
- **Program Requesting Authority**
  Ari Suharto (Yayasan BATARI)
- **Kemitraan Publik-Swasta untuk Pengelolaan Air Berkelanjutan**
  Asep Andi Yusuf (PT. WSL)

Sesi 3
Memanfaatkan Pasar untuk Melindungi Infrastruktur Alam: Pasar Karbon dan Mekanisme Solusi Berbasis Alam

Waktu
Kamis, Sept 10 2026 (08.30 - 12.00 WIB)

Topik
Membangun Kondisi Pendukung untuk Sinergi Sektor Publik dan Swasta melalui Mekanisme Pasar (Proses, hal yang berhasil, dan bagaimana sektor swasta terlibat)

Moderator
- Jason Gray (GCF Task Force)
- Syahrina D. Anggraini (GCF Task Force)

Pembicara:
- **Peran Sektor Swasta dalam Article 6**
  Bjorn Fonden (IETA)
- **Peran Multipihak dalam ART/TREES**
  Arif Budiman (ART Secretariat)
- **Proyek Karbon Berintegritas Tinggi di Brasil**
  Carlos Aragon (Brazil)
- **Pasar Kepatuhan: Program Cap-and-Invest California**
  Shannon Dilley (CARB, California)
- **Potensi Peran Sektor Swasta dalam J-REDD+, pembelajaran dari FCPF**
  Prof. Daddy Ruhiyat (East Kalimantan, Indonesia)2
- **ASEAN Net-Zero Hub**
  Rifki Weno (ASEAN BAC)

Sesi 4
NDPE untuk Komoditas Berkelanjutan

Waktu
Kamis, Sept 10 2026 (13.00 - 16.00 WIB)

Topik
Pengalaman dan Pendekatan untuk Memajukan NDPE dalam Rantai Pasok Komoditas Berkelanjutan

Moderator
- Fakhrizal Nashr (CDP)
- Daniel Coronel (GCF Task Force Peru)

Pembicara:
- **Perspektif Pembeli: Permintaan Global untuk Komoditas Berkelanjutan**
  Claire Prescott (CDP)
- **Guardian Forestal: Pendekatan Lanskap Yurisdiksional untuk Produksi Komoditas Berkelanjutan dan Perlindungan Hutan**
  Alejandro Mendez (Michoacan, Mexico)
- **Huanuco: Aliansi Bisnis untuk Amazon**
  Luis Briceno (Huanuco, Peru)
- **Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tengah**
  Edy Pratowo (Central Kalimantan, Indonesia)
- **Komoditas Karet Berkelanjutan yang Selaras dengan EUDR**
  Robi Ramdani (Olam Agri)
- **Produksi Ternak Regeneratif untuk Pertanian Berkelanjutan**
  Juan Pablo Jaramillo (Caqueta, Colombia)
- **Produksi Berkelanjutan di Hutan Peru Utara**
  Frank Sanchez (La Libertad, Peru)

Seruan Inisiatif

Requesting Authority Program
Supporting Mitigation and Adaptation through BLUD

Program Requesting Authority

Program Requesting Authority merupakan sebuah inisiatif yang dilaksanakan di **Kalimantan Barat** oleh **BATARI dan NIN**, yang melibatkan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperkuat aksi iklim di tingkat regional. Program ini akan mendukung para pemangku kepentingan daerah dalam melakukan pengumpulan dan penilaian data terkait iklim, yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan dan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi yang sesuai melalui platform CDP.

Inisiatif ini juga bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, pelaku sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan terhadap aksi iklim, khususnya kendala pembiayaan. Melalui pendekatan ini, program diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan pelaku sektor swasta dalam mengembangkan program iklim berbasis bukti, meningkatkan pengelolaan dan pengungkapan data iklim, serta memobilisasi sumber daya untuk pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Mendukung Mitigasi dan Adaptasi melalui BLUD

Inisiatif Dukungan mitigasi dan adaptasi melalui BLUD menyoroti potensi peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai mekanisme kelembagaan dan pembiayaan untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat daerah. Inisiatif ini juga menekankan pentingnya panduan kebijakan yang jelas serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan pengaturan kelembagaan yang efektif dalam pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan program-program terkait iklim. Inisiatif ini juga mencerminkan adanya kepentingan bersama di antara para pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat kebijakan dan program iklim di daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, serta mengeksplorasi potensi BLUD dalam mendukung pelaksanaan dan perluasan aksi iklim, sekaligus mengatasi tantangan kelembagaan dan pembiayaan di tingkat daerah.

Dua poin utama yang disoroti dalam diskusi:

- **BLUD dapat berperan sebagai instrumen kelembagaan dan operasional untuk mendukung pelaksanaan NEK serta program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat daerah.**
- **Kolaborasi dengan BLUD provinsi dapat menjadi mekanisme penting untuk mendukung dan memperluas program yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten.**

Secara keseluruhan, diskusi menekankan bahwa pengembangan BLUD tidak seharusnya dilihat semata-mata sebagai sebuah platform, tetapi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun ekosistem yang memungkinkan terwujudnya aksi iklim, pembiayaan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi daerah. Koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku sektor swasta, serta pemangku kepentingan lainnya akan menjadi hal yang penting untuk menerjemahkan kerangka kebijakan yang ada menjadi aksi mitigasi dan adaptasi yang konkret di lapangan.

Deskripsi Sesi

- Inisiasi Bersama: Upaya Restorasi dan Konservasi
- Inisiatif Kemitraan Publik-Swasta di Kalimantan Barat
- Memanfaatkan Pasar untuk Melindungi Infrastruktur Alam: Pasar Karbon dan Mekanisme Solusi Berbasis Alam
- NDPE untuk Komoditas Berkelanjutan






Inisiasi bersama: Upaya Restorasi dan Konservasi

Pengalaman dan Pendekatan Restorasi dan Konservasi di Berbagai Yurisdiksi dan Organisasi

Sesi ini akan mempertemukan berbagai pengalaman dari yurisdiksi dan organisasi yang mengembangkan pendekatan praktis untuk restorasi hutan, konservasi, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Berbagai contoh tersebut akan menunjukkan bagaimana inisiatif-inisiatif ini diterapkan dalam konteks yang berbeda, serta bagaimana pemerintah, pelaku sektor swasta, masyarakat, dan mitra lainnya berkontribusi terhadap pengembangan dan keberlanjutan jangka panjangnya.

Sesi ini akan mengeksplorasi pendekatan, model kemitraan, mekanisme pembiayaan, dan kondisi pendukung yang mendukung inisiatif restorasi dan konservasi. Sesi ini juga akan menjadi kesempatan untuk berbagi pembelajaran dari implementasi serta mempertimbangkan bagaimana pengalaman yang relevan dapat diadaptasi atau diperluas di yurisdiksi lainnya.

Sesi ini bertujuan untuk:

- **Memberikan gambaran mengenai pendekatan praktis untuk restorasi dan konservasi dalam berbagai konteks.**
- **Mengeksplorasi model kemitraan, implementasi, dan pembiayaan yang dapat mendukung inisiatif tersebut.**
- **Mengkaji kondisi pendukung, tantangan, dan peluang yang memengaruhi keberlanjutan jangka panjang.**
- **Berbagi pembelajaran serta mengidentifikasi peluang untuk pertukaran pengetahuan dan kolaborasi.**

Kasus-kasus berikut menyajikan berbagai pendekatan untuk menghubungkan konservasi dan restorasi dengan pembiayaan, keterlibatan sektor swasta, mata pencaharian berkelanjutan, dan pembangunan ekonomi lokal.



Inisiasi bersama: Upaya Restorasi dan Konservasi

Pengalaman dan Pendekatan Restorasi dan Konservasi di Berbagai Yurisdiksi dan Organisasi

1. Herencia Maya - Yucatan, Mexico

Herencia Maya (Warisan Maya) merupakan inisiatif pembiayaan konservasi inovatif yang diluncurkan oleh Pemerintah Yucatán pada tahun 2026 untuk menjamin pendanaan jangka panjang bagi perlindungan warisan ekologis, hidrologis, dan budaya negara bagian tersebut. Inisiatif ini merupakan Project Finance for Permanence (PFP) pertama di Meksiko dan inisiatif PFP pertama di negara tersebut yang dipimpin oleh pemerintah negara bagian. Melalui mekanisme pembiayaan senilai US$12,6 juta selama lima tahun, inisiatif ini mempertemukan pemerintah, mitra sektor swasta, donor filantropi dan publik, LSM, serta masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk memperkuat pengelolaan kawasan lindung dan ekosistem penting di seluruh Yucatán.

Inisiatif ini menunjukkan bagaimana pembiayaan inovatif dapat menciptakan kemitraan publik-swasta jangka panjang untuk konservasi. Selain melindungi hutan, mangrove, ekosistem pesisir, dan sumber air, Herencia Maya mengintegrasikan warisan budaya Maya dan mata pencaharian masyarakat ke dalam pendekatan konservasinya, termasuk agroforestri tradisional, perlebahan berkelanjutan, perikanan, dan ekowisata. Model ini memberikan contoh bagaimana pemerintah subnasional dapat memobilisasi berbagai mitra dan sumber daya keuangan untuk mewujudkan visi konservasi bersama dalam jangka panjang.

Bacaan lebih lanjut: https://www.worldwildlife.org/places/earth-for-life/herencia-maya/

2.Produce, Conserve, and Include (PCI) - Mato Grosso, Brazil

Strategi Produce, Conserve and Include (PCI) Mato Grosso merupakan pendekatan yurisdiksional yang mempertemukan pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, masyarakat sipil, dan mitra internasional untuk mendorong penggunaan lahan berkelanjutan di seluruh negara bagian.

Diluncurkan oleh Pemerintah Mato Grosso pada COP21 tahun 2015, strategi ini menghubungkan produksi pertanian berkelanjutan, konservasi hutan, restorasi, dan inklusi sosial dalam satu kerangka bersama. Mekanisme investasinya didukung oleh PCI Institute dan Investment Committee, yang membantu menghubungkan investor, perusahaan, pembeli, dan mitra pembangunan dengan berbagai proyek yang selaras dengan tujuan PCI.

Salah satu contoh penting kolaborasi publik-swasta ini adalah PCI Pitchbook dan Corporate Action Group, yang menyediakan platform bagi perusahaan dan investor untuk mengidentifikasi dan mendukung proyek-proyek berkelanjutan di Mato Grosso. Kemitraan telah melibatkan perusahaan, bank, lembaga multilateral, LSM, dan berbagai inisiatif internasional, termasuk Tropical Forest Alliance. Melalui model ini, keterlibatan sektor swasta dihubungkan dengan tujuan keberlanjutan wilayah, sehingga investasi dalam produksi komoditas berkelanjutan, konservasi, restorasi, dan pertanian keluarga dapat berkontribusi terhadap target yang lebih luas di tingkat negara bagian.

Bacaan lebih lanjut: https://pcimt.org/

Inisiasi bersama: Upaya Restorasi dan Konservasi

Pengalaman dan Pendekatan Restorasi dan Konservasi di Berbagai Yurisdiksi dan Organisasi

3.Conservation Fund in Tarija - Tarija, Bolivia

Tarija telah mengembangkan mekanisme pembiayaan inovatif untuk mendukung konservasi jangka panjang hutan, sumber air, dan ekosistem lainnya yang penting bagi masyarakat dan kegiatan produktif di wilayah tersebut. Salah satu contohnya adalah pembentukan dana konservasi dan dana air yang mempertemukan lembaga publik, perusahaan penyedia layanan air, organisasi masyarakat sipil, dan mitra sektor swasta untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya bagi perlindungan ekosistem.

Mekanisme ini mengakui keterkaitan antara ekosistem yang sehat, ketahanan air, dan ekonomi lokal, serta menyediakan cara untuk menyalurkan kontribusi dari pihak-pihak yang bergantung pada sumber daya alam tersebut untuk mendukung perlindungan jangka panjangnya.

Pengalaman di Tarija menunjukkan bagaimana dana konservasi dapat menyediakan basis pembiayaan yang lebih berkelanjutan untuk pengelolaan ekosistem di luar anggaran publik konvensional. Dalam kasus Cordillera de Sama, misalnya, kontribusi sektor swasta melalui inisiatif Apoya Sama mendukung perlindungan kawasan lindung dan sumber airnya, sementara Municipal Water Fund menyediakan mekanisme pembiayaan publik yang bersifat komplementer. Secara bersama-sama, pendekatan tersebut menunjukkan bagaimana berbagai sumber pendanaan dan pemangku kepentingan dapat dipertemukan berdasarkan kepentingan bersama terhadap ketahanan air dan konservasi.

Bacaan lebih lanjut:

- https://prometa.org.bo/mecanismos-por-sama/
- https://www.naturabolivia.org/noticia/tarija-conforma-el-fondo-de-agua-mas-grande-de-bolivia-para-la-conservacion-de-recursos-hidricos/

4.Crown Jewel of Papua - West Papua, Indonesia

Crown Jewel of Papua, atau Mahkota Permata Tanah Papua (MPTP), merupakan inisiatif lanskap terpadu yang mencakup sekitar 2,3 juta hektare di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Inisiatif ini mengintegrasikan perlindungan hutan dan ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam satu kerangka lanskap.

Lanskap tersebut mencakup berbagai ekosistem, mulai dari pegunungan dan hutan hujan primer hingga dataran rendah, lahan basah, sabana, dan wilayah pesisir, serta menjadi tempat tinggal bagi berbagai komunitas masyarakat adat.

Inisiatif ini menunjukkan bagaimana konservasi dapat dilakukan secara bersamaan dengan pembangunan lokal dan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat. Pendekatannya mencakup penguatan tata kelola lanskap kolaboratif, dukungan terhadap perhutanan adat dan sosial, pengembangan mata pencaharian berkelanjutan, serta peningkatan peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Pembentukan forum kolaboratif multipihak yang melibatkan pemerintah provinsi, perwakilan masyarakat adat, lembaga pemerintah, masyarakat sipil, mitra internasional, dan sektor swasta semakin menunjukkan upaya untuk membangun pendekatan bersama dalam pengelolaan lanskap tersebut.

Crown Jewel of Papua dengan demikian memberikan contoh pengelolaan berskala lanskap mengenai bagaimana konservasi dapat dikaitkan dengan hak masyarakat, mata pencaharian berkelanjutan, dan pembangunan ekonomi yang lebih luas. Inisiatif ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra lainnya dalam mengelola lanskap yang luas dan memiliki keragaman ekologis tinggi, sekaligus mempertahankan nilai lingkungan dan budayanya.

Bacaan lebih lanjut:: https://wri-indonesia.org/en/insights/crown-jewel-papua-protecting-heart-life-birds-head-papua-island

5.Amazon Future Fund - Ecuador

Amazon Future Fund (AFF) merupakan mekanisme pembiayaan konservasi jangka panjang yang sedang dikembangkan untuk mendukung perlindungan hutan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Amazon Ekuador. Dana ini dikelola bersama oleh masyarakat adat dan pemerintah provinsi, dengan kedua kelompok memiliki peran yang setara dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan.

Dana ini dibangun berdasarkan Amazonian Platform, yaitu kolaborasi antara kelompok masyarakat adat dan pemerintah provinsi untuk mengoordinasikan konservasi dan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah tersebut. Pada tahap awal, dana ini didukung oleh kontribusi publik dan kontribusi dari para pendiri, dengan rencana untuk memobilisasi sumber daya tambahan dari REDD+, donor, mitra sektor swasta, dan sumber lainnya dari waktu ke waktu.

Dana ini akan membiayai empat bidang utama:

- **Konservasi dan restorasi**
- **Transisi menuju sistem produksi berkelanjutan**
- **Pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK)**
- **Tata kelola serta peningkatan kapasitas.**

Hal ini memungkinkan pembiayaan untuk mendukung tidak hanya perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga kegiatan ekonomi berkelanjutan serta kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk mengelola wilayah masyarakat adat dan kawasan konservasi.

Dana ini dirancang untuk menyalurkan sumber daya berdasarkan prioritas yang diidentifikasi secara lokal, termasuk Indigenous Life Plans, rencana pengelolaan konservasi provinsi, dan implementasi REDD+.

Amazonian Platform telah berhasil mengamankan lebih dari 10 juta acre kawasan lindung di tiga provinsi, dengan platform yang lebih luas bertujuan memperluas perlindungan di seluruh Amazon Ekuador. Amazon Future Fund sedang dikembangkan sebagai mekanisme untuk menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi jaringan konservasi tersebut dan memperkuat kepemilikan lokal atas pembiayaan konservasi.

Bacaan lebih lanjut: https://www.natureandculture.org/conservation_initiatives/the-amazon-future-fund/

Deskripsi Sesi

Kemitraan Publik-Swasta di Kalimantan Barat

Menampilkan Inisiatif Kemitraan Publik-Swasta di Kalimantan Barat

Sesi ini akan menampilkan berbagai inisiatif kemitraan publik-swasta terpilih di Kalimantan Barat, dengan menyoroti bagaimana pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra lainnya bekerja sama untuk mendorong pengelolaan hutan dan lanskap yang berkelanjutan.

Sesi ini akan mengambil pembelajaran dari berbagai konteks kelembagaan dan tematik, dengan menyoroti peran berbagai aktor, pendekatan kemitraan, serta pembelajaran dari implementasi.

Sesi ini bertujuan untuk:

- **Menampilkan berbagai inisiatif dan pendekatan kemitraan di Kalimantan Barat.**
- **Berbagi pembelajaran utama, peluang, dan tantangan dari berbagai model kemitraan.**
- **Menyoroti peluang kolaborasi dan investasi dalam ekonomi hutan berkelanjutan di Kalimantan Barat.**
- **Menggali pembelajaran yang relevan bagi yurisdiksi lain yang ingin memperkuat kemitraan publik-swasta.**

Contoh-contoh berikut menggambarkan berbagai pintu masuk untuk kolaborasi, termasuk keterlibatan sektor swasta, perencanaan tingkat lanskap, konservasi berbasis masyarakat, dan pembiayaan iklim.



Kemitraan Publik-Swasta di Kalimantan Barat

Menampilkan Inisiatif Kemitraan Publik-Swasta di Kalimantan Barat

1. Green Climate Fund Project

Proyek Green Climate Fund (GCF) "Land-based Mitigation and Adaptation through a Jurisdictional Approach in West Kalimantan" (FP248) memberikan contoh bagaimana pembiayaan iklim publik dan internasional dapat mendukung aksi iklim di seluruh wilayah yurisdiksi. Disetujui pada Oktober 2024 dan dilaksanakan dengan GIZ sebagai entitas terakreditasi, proyek ini mencakup lima kabupaten —Kapuas Hulu, Ketapang, Kubu Raya, Sanggau, dan Sintang—dan berfokus pada tata kelola penggunaan lahan berkelanjutan, pertanian yang tangguh terhadap iklim, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, serta peluang ekonomi berkelanjutan. Proyek ini menyediakan sekitar USD 68,7 juta pembiayaan dari GCF, yang dilengkapi dengan USD 47,0 juta dalam bentuk pembiayaan bersama dan kontribusi natura.

Dari perspektif kemitraan publik-swasta, FP248 menyediakan platform untuk menghubungkan program yurisdiksional dengan keterlibatan sektor swasta melalui rantai pasok komoditas berkelanjutan, investasi yang bertanggung jawab, bantuan teknis, dan pembiayaan bersama. Proyek ini menunjukkan bagaimana pembiayaan iklim publik dapat membantu mengatasi hambatan sistemik dan menciptakan kondisi yang memungkinkan investasi sektor swasta, sekaligus menghubungkan hasil konservasi dan restorasi dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam skala luas.

Bacaan lebih lanjut: https://www.greenclimate.fund/portfolio/projects/fp248

2. Cagar Biosfer Mata Pandawa

Usulan Cagar Biosfer Mata Pandawa merupakan pendekatan berskala lanskap untuk mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan kolaborasi multipihak di Kalimantan Barat.
Lanskap yang diusulkan mencakup sekitar 2,56 juta hektare dan menghubungkan ekosistem laut Karimata, Taman Nasional Gunung Palung, dan kawasan hutan lindung Mendawak. Lanskap tersebut mencakup berbagai bentuk penggunaan lahan dan kegiatan ekonomi, termasuk konsesi kehutanan, konsesi kelapa sawit, dan skema perhutanan sosial.

Alih-alih menetapkan suatu lanskap yang hanya diperuntukkan bagi konservasi, pendekatan cagar biosfer menyediakan kerangka untuk menyelaraskan tujuan konservasi dengan kegiatan ekonomi berkelanjutan dan mata pencaharian masyarakat. Struktur zonasi yang diusulkan—yang terdiri atas zona inti, penyangga, dan transisi—dapat menjadi dasar bagi berbagai bentuk kemitraan antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal ini menciptakan peluang bagi keterlibatan sektor swasta dalam berbagai bidang seperti komoditas berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, restorasi ekosistem, perhutanan sosial, dan rantai pasok yang bertanggung jawab, dengan tetap menjaga integritas ekologis lanskap secara keseluruhan.

Inisiatif Mata Pandawa dengan demikian menunjukkan bagaimana lanskap yurisdiksional yang terdefinisi dengan jelas dapat menjadi platform bagi kemitraan publik-swasta. Dengan mempertemukan otoritas pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pengetahuan dalam satu kerangka lanskap bersama, inisiatif ini dapat membantu menyelaraskan investasi sektor swasta dengan tujuan konservasi dan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.

Kemitraan Publik-Swasta di Kalimantan Barat

Menampilkan Inisiatif Kemitraan Publik-Swasta di Kalimantan Barat

3.Inisiatif Konservasi Berbasis Masyarakat

Konservasi berbasis masyarakat merupakan pendekatan penting untuk mengintegrasikan perlindungan hutan, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, dan mata pencaharian lokal. Di Indonesia, perhutanan sosial memberikan akses legal kepada masyarakat lokal untuk mengelola kawasan hutan yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan peluang bagi masyarakat untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam konservasi dan pengelolaan lanskap hutan secara berkelanjutan. Namun, kawasan pengelolaan yang terfragmentasi, keterbatasan kapasitas teknis dan kelembagaan, serta tantangan dalam mengakses pasar dan pembiayaan dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk sepenuhnya mewujudkan potensi ekonomi dan konservasi hutannya.

Hal ini menciptakan peran penting bagi organisasi masyarakat sipil dan pihak perantara lainnya untuk memperkuat kelembagaan masyarakat, memfasilitasi kemitraan, serta menghubungkan inisiatif lokal dengan program pemerintah, mitra sektor swasta, dan sumber pembiayaan berkelanjutan yang potensial. SAMPAN Kalimantan memberikan contoh pendekatan ini di Kalimantan Barat. Melalui berbagai inisiatif seperti lanskap Delta Kapuas di Kubu Raya, SAMPAN bekerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal untuk memperkuat perhutanan sosial, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan pengembangan mata pencaharian.

Dengan mempertemukan 20 desa yang memiliki hak pengelolaan Hutan Desa melalui pendekatan lanskap kolektif, SAMPAN membantu mengatasi fragmentasi serta menciptakan peluang yang lebih besar untuk kolaborasi dan investasi. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana hak masyarakat atas hutan, fasilitasi masyarakat sipil, dan keterlibatan sektor swasta dapat dihubungkan untuk mendukung konservasi dan restorasi hutan sekaligus menciptakan peluang ekonomi dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Bacaan lebih lanjut: https://sampankalimantan.id/

4.Requesting Authority Program

Requesting Authority Program dari Carbon Disclosure Project (CDP) menyediakan platform yang memungkinkan pemerintah menyampaikan prioritas iklim, lingkungan, dan investasi mereka secara langsung kepada sektor swasta. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi pemerintah subnasional pertama yang berpartisipasi sebagai Requesting Authority pada platform CDP, sehingga menciptakan peluang untuk menampilkan prioritas investasi berbasis lanskap provinsi kepada perusahaan dan calon mitra lainnya. Inisiatif ini menargetkan keterlibatan dengan 50 perusahaan prioritas dan 14 pemerintah daerah, khususnya di sekitar lanskap Mata Pandawa.

Program ini menunjukkan bagaimana pemerintah subnasional dapat menggunakan platform pengungkapan dan keterlibatan korporasi tidak hanya untuk meningkatkan transparansi, tetapi juga untuk mengidentifikasi calon mitra sektor swasta serta menghubungkan komitmen iklim perusahaan dengan prioritas yurisdiksional.

Dengan menampilkan peluang lanskap yang siap diinvestasikan, inisiatif ini berupaya menjembatani kesenjangan antara program konservasi dan restorasi yang dipimpin pemerintah dengan pembiayaan sektor swasta, keterlibatan rantai pasok, dan komitmen keberlanjutan perusahaan. Hal ini memberikan model potensial bagi yurisdiksi lain yang ingin menggunakan platform keterlibatan korporasi untuk memobilisasi investasi swasta bagi prioritas lingkungan berskala lanskap.

Bacaan lebih lanjut: https://foresteconomyforum.com/en/

5.Kemitraan Publik-Swasta untuk Pengelolaan Air Berkelanjutan

PT. Wana Subur Lestari (PT. WSL), sebuah perusahaan kehutanan yang beroperasi sebagai Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat, memberikan contoh bagaimana pengelolaan hutan oleh sektor swasta dapat berkontribusi terhadap pengelolaan air berkelanjutan dan perlindungan hutan. Melalui pengelolaan sumber daya air secara bertanggung jawab di dalam wilayah pengelolaan hutannya, PT. WSL berupaya mempertahankan fungsi hutan serta melindungi berbagai komponen penting dan nilai ekosistem hutan. Oleh karena itu, pengelolaan air dipandang sebagai bagian penting dalam mempertahankan kondisi hutan dan mendukung keberlanjutan lanskap dalam jangka panjang.

Dari perspektif kemitraan publik-swasta, PT. WSL menunjukkan bagaimana perusahaan kehutanan dapat berkontribusi terhadap tujuan lingkungan dan pengelolaan hutan yang lebih luas melalui pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Pengalaman ini menyoroti peran sektor swasta dalam mendukung perlindungan hutan di Kalimantan Barat, sekaligus menunjukkan bagaimana pengelolaan air berkelanjutan dapat melengkapi upaya konservasi hutan dan berkontribusi dalam mempertahankan fungsi ekologis lanskap hutan. Inisiatif ini memberikan contoh bagaimana aksi sektor swasta di tingkat tapak dapat mendukung upaya yurisdiksional yang lebih luas untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

Memanfaatkan Pasar untuk Melindungi Infrastruktur Alam: Pasar Karbon dan Mekanisme Solusi Berbasis Alam

Membangun Kondisi Pendukung untuk Sinergi Sektor Publik dan Swasta melalui Mekanisme Pasar (Proses, hal yang berhasil, dan bagaimana sektor swasta terlibat)

Sesi ini akan mempertemukan pengalaman dari berbagai yurisdiksi, pelaku sektor swasta, dan mitra lainnya yang bekerja dalam bidang pasar karbon dan solusi berbasis alam.

Sesi ini akan melihat pendekatan praktis baik dalam pasar kepatuhan maupun pasar sukarela, termasuk bagaimana berbagai mekanisme dirancang dan diterapkan, kondisi yang memungkinkan mekanisme tersebut berjalan, serta peluang yang dapat diciptakannya untuk memobilisasi pembiayaan bagi produksi berkelanjutan, tata kelola hutan, dan mata pencaharian.

Dengan membangun pembelajaran dari pertukaran GCF Task Force sebelumnya mengenai pasar karbon dan REDD+ yurisdiksional di Caquetá, Kolombia, sesi ini akan berfokus pada pembelajaran praktis serta kebutuhan yurisdiksi dan pelaku pasar.

Sesi ini juga akan mempertimbangkan bagaimana pendekatan yang telah ada dapat diadaptasi, serta bagaimana yurisdiksi dan masyarakat dapat terhubung dengan mitra sektor swasta dan peluang pasar.

Sesi ini bertujuan untuk:

- **Berbagi praktik efektif dan kondisi pendukung dari berbagai inisiatif pasar karbon dan solusi berbasis alam.**
- **Mengeksplorasi solusi dan jalur praktis yang dapat diadaptasi atau direplikasi oleh yurisdiksi.**
- **Memberikan panduan untuk memajukan upaya REDD+ yurisdiksi, termasuk melalui ART/TREES.**
- **Menghubungkan yurisdiksi dan masyarakat dengan kebutuhan, peluang, dan calon mitra dari sektor swasta.**

Kasus-kasus berikut menyoroti perspektif dan pendekatan yang berbeda dalam pasar kepatuhan, REDD+ yurisdiksi, pasar karbon sukarela, platform bisnis regional, dan kebutuhan pasar sektor swasta.



Memanfaatkan Pasar untuk Melindungi Infrastruktur Alam: Pasar Karbon dan Mekanisme Solusi Berbasis Alam

Membangun Kondisi Pendukung untuk Sinergi Sektor Publik dan Swasta melalui Mekanisme Pasar (Proses, hal yang berhasil, dan bagaimana sektor swasta terlibat)

1. Peran Sektor Swasta dalam Pasal 6

Sektor swasta memiliki peran penting dalam pengembangan dan implementasi mekanisme pasar karbon Pasal 6, termasuk sebagai pengembang proyek, investor, pembeli, pedagang, dan pelaku pasar lainnya. Dari perspektif dunia usaha, regulasi yang jelas dan dapat diprediksi, aturan pasar yang kredibel, integritas lingkungan yang kuat, infrastruktur pasar yang transparan, serta keselarasan dengan kerangka pasar karbon internasional merupakan kondisi penting untuk berpartisipasi dalam pasar Pasal 6 dan mengambil keputusan investasi jangka panjang.

International Emissions Trading Association (IETA) mempertemukan perusahaan dan organisasi yang terlibat dalam pasar karbon sukarela dan pasar kepatuhan serta memberikan perspektif sektor swasta dalam pengembangan kerangka pasar karbon. Melalui inisiatif seperti Business Partnership for Market Implementation (B-PMI), IETA bekerja sama dengan pemerintah untuk mengidentifikasi hambatan regulasi, memperkuat kerangka pasar, dan mendukung kondisi yang diperlukan bagi partisipasi sektor swasta. Keterlibatannya di Indonesia memberikan wawasan mengenai bagaimana sinyal kebijakan, desain pasar, dan kepastian regulasi dapat memengaruhi keterlibatan sektor swasta dalam Pasal 6 dan pengembangan peluang pasar karbon.

Bacaan lebih lanjut: https://www.ieta.org/

2. Peran Multipihak dalam ART/TREES

Architecture for REDD+ Transactions (ART) merupakan inisiatif global yang dirancang untuk memobilisasi pembiayaan bagi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada tingkat nasional dan yurisdiksi subnasional berskala besar. Inti dari ART adalah REDD+ Environmental Excellence Standard (TREES), yang menyediakan kerangka bersama bagi yurisdiksi untuk mengkuantifikasi, memantau, melaporkan, dan memverifikasi pengurangan serta penyerapan emisi hutan, sekaligus mengintegrasikan perlindungan lingkungan dan sosial, transparansi, serta integritas lingkungan.

Implementasi ART/TREES melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, mitra teknis, organisasi masyarakat sipil, pengembang proyek dan program, investor, serta pelaku pasar karbon. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam mendukung program REDD+ yurisdiksi, mulai dari mengembangkan dan melaksanakan program serta memenuhi persyaratan TREES hingga menyediakan dukungan teknis, pemantauan dan verifikasi, pembiayaan, serta keterlibatan dalam pasar karbon. Sekretariat ART akan menjelaskan bagaimana berbagai peran tersebut terhubung dalam proses ART/TREES, termasuk registrasi, pemantauan, verifikasi, penerbitan kredit, dan keterlibatan pasar.

Bacaan lebih lanjut: https://artredd.org/

Memanfaatkan Pasar untuk Melindungi Infrastruktur Alam: Pasar Karbon dan Mekanisme Solusi Berbasis Alam

Membangun Kondisi Pendukung untuk Sinergi Sektor Publik dan Swasta melalui Mekanisme Pasar (Proses, hal yang berhasil, dan bagaimana sektor swasta terlibat)

3. Proyek Karbon Berintegritas Tinggi di Brasil

Pengembangan proyek karbon di Amazon Brasil memerlukan landasan hukum dan sosial-lingkungan yang kuat untuk memastikan bahwa pembiayaan karbon menghasilkan dampak iklim dan kehutanan yang kredibel. Pertimbangan utama mencakup kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, kejelasan hak atas lahan dan karbon, penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, partisipasi pemangku kepentingan yang bermakna, serta perlindungan lingkungan dan sosial yang sesuai.

Pengalaman di Amazon Brasil menunjukkan pentingnya menangani pertimbangan tersebut sepanjang siklus proyek karbon, mulai dari pengembangan proyek dan keterlibatan pemangku kepentingan hingga implementasi, pemantauan, dan verifikasi. Practical Guide on Legal Compliance and Socio-Environmental Safeguards for High-Integrity Carbon Projects in the Brazilian Amazon, yang dikembangkan oleh Climate Focus dan LACLIMA dengan dukungan Amazon Investor Coalition dan VCMI, menghimpun panduan praktis mengenai isu-isu tersebut dan mengambil masukan dari pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bacaan lebih lanjut: https://climatefocus.com/publications/carbon-projects-brazil-amazon-guide/

4. Pasar Kepatuhan: Program Cap-and-Invest California

Program Cap-and-Invest California, yang dikelola oleh California Air Resources Board (CARB), merupakan pasar karbon kepatuhan yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui batas emisi yang semakin menurun dan mekanisme berbasis pasar. Didirikan pada tahun 2013, program ini mewajibkan entitas yang tercakup untuk memperoleh dan menyerahkan allowance sesuai dengan emisinya, sementara allowance tersebut dapat diperdagangkan. Hal ini menciptakan insentif ekonomi bagi perusahaan untuk mengurangi emisi dan berinvestasi pada teknologi yang lebih bersih. Program ini mencakup sekitar 80% emisi gas rumah kaca California dan terhubung dengan pasar karbon Québec, sehingga membentuk sistem perdagangan emisi Amerika Utara yang lebih luas.

Program ini menunjukkan bagaimana pemerintah subnasional dapat menggunakan penetapan harga karbon dan perdagangan emisi untuk mendorong dekarbonisasi sektor swasta. Melalui kerangka regulasi yang dapat diprediksi dan infrastruktur pasar karbon yang berfungsi, California memberikan fleksibilitas kepada dunia usaha dalam memenuhi kewajiban kepatuhan sambil mempertahankan jalur penurunan emisi. Pengalaman ini juga menunjukkan bagaimana sistem perdagangan emisi dapat berkembang melalui kerja sama antar-yurisdiksi dan memberikan pembelajaran bagi pemerintah yang mempertimbangkan pengembangan pasar karbon kepatuhan mereka sendiri.

Bacaan lebih lanjut: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/cap-and-invest-program

Memanfaatkan Pasar untuk Melindungi Infrastruktur Alam: Pasar Karbon dan Mekanisme Solusi Berbasis Alam

Membangun Kondisi Pendukung untuk Sinergi Sektor Publik dan Swasta melalui Mekanisme Pasar (Proses, hal yang berhasil, dan bagaimana sektor swasta terlibat)

5.Potensi Peran Sektor Swasta dalam J-REDD+, Pembelajaran dari FCPF – Kalimantan Timur, Indonesia

Program Emission Reductions Yurisdiksi Kalimantan Timur, yang didukung oleh Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund, merupakan program REDD+ berbasis hasil yang dirancang untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di seluruh provinsi. Mencakup sekitar 12,7 juta hektare, program ini menggabungkan perlindungan hutan dan pengelolaan lahan berkelanjutan dengan perbaikan tata kelola hutan, perizinan, dan perencanaan berbasis masyarakat. Melalui Emission Reductions Payment Agreement (ERPA), pengurangan emisi terverifikasi yang dihasilkan melalui program tersebut memenuhi syarat untuk menerima pembayaran berbasis hasil dari FCPF.

Program ini merupakan contoh penting mengenai bagaimana konservasi hutan yurisdiksi dapat dikaitkan dengan pembiayaan iklim berbasis kinerja. Kalimantan Timur menghasilkan 26,2 juta ton pengurangan emisi terverifikasi, di mana 22 juta ton dikontrak dan dibayarkan oleh FCPF, menghasilkan pembayaran berbasis hasil sebesar US$110 juta. Penggunaan dan distribusi pembayaran tersebut diatur melalui Benefit Sharing Plan, dengan manfaat diarahkan kepada lembaga pemerintah terkait, masyarakat, Masyarakat Adat, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pencapaian pengurangan emisi. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya koordinasi yurisdiksi, safeguards, pembagian manfaat, dan kapasitas kelembagaan jangka panjang dalam melaksanakan program REDD+ berbasis hasil.

Bacaan lebih lanjut: https://www.forestcarbonpartnership.org/country/indonesia

6.ASEAN Net Zero Hub

ASEAN Net Zero Hub (ANZH) merupakan platform regional yang diinisiasi oleh ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) untuk mendukung dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam memajukan perjalanan menuju net zero. Hub ini memfasilitasi berbagi pengetahuan, pertukaran praktik terbaik, dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil, dengan fokus pada memungkinkan industri di seluruh ASEAN mempercepat dekarbonisasi dan mengadopsi solusi praktis untuk ekonomi rendah karbon.

Dalam ekosistem pasar karbon dan pembiayaan berkelanjutan yang lebih luas, ASEAN Net Zero Hub menyediakan platform bagi dunia usaha untuk memahami dan menavigasi transisi menuju net zero, sementara inisiatif pelengkap seperti Carbon Centre of Excellence dan ASEAN Alliance on Carbon Markets (AACM) lebih berfokus pada pasar karbon, perdagangan karbon, dan pengembangan pasar. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan proyek karbon adalah menghubungkan proyek yang kredibel dengan calon investor dan pembeli. Dalam konteks ini, GCF Task Force dapat berperan sebagai jembatan dengan menghubungkan yurisdiksi dan pengembang proyek dengan calon investor dan pelaku pasar karbon, sehingga membantu menerjemahkan inisiatif iklim dan kehutanan yurisdiksi menjadi peluang yang layak diinvestasikan.

Bacaan lebih lanjut: https://aseanbacindonesia.id/legacy-project/asean-net-zero-hub

NDPE untuk Komoditas Berkelanjutan

Pengalaman dan Pendekatan untuk Memajukan NDPE dalam Rantai Pasok Komoditas Berkelanjutan

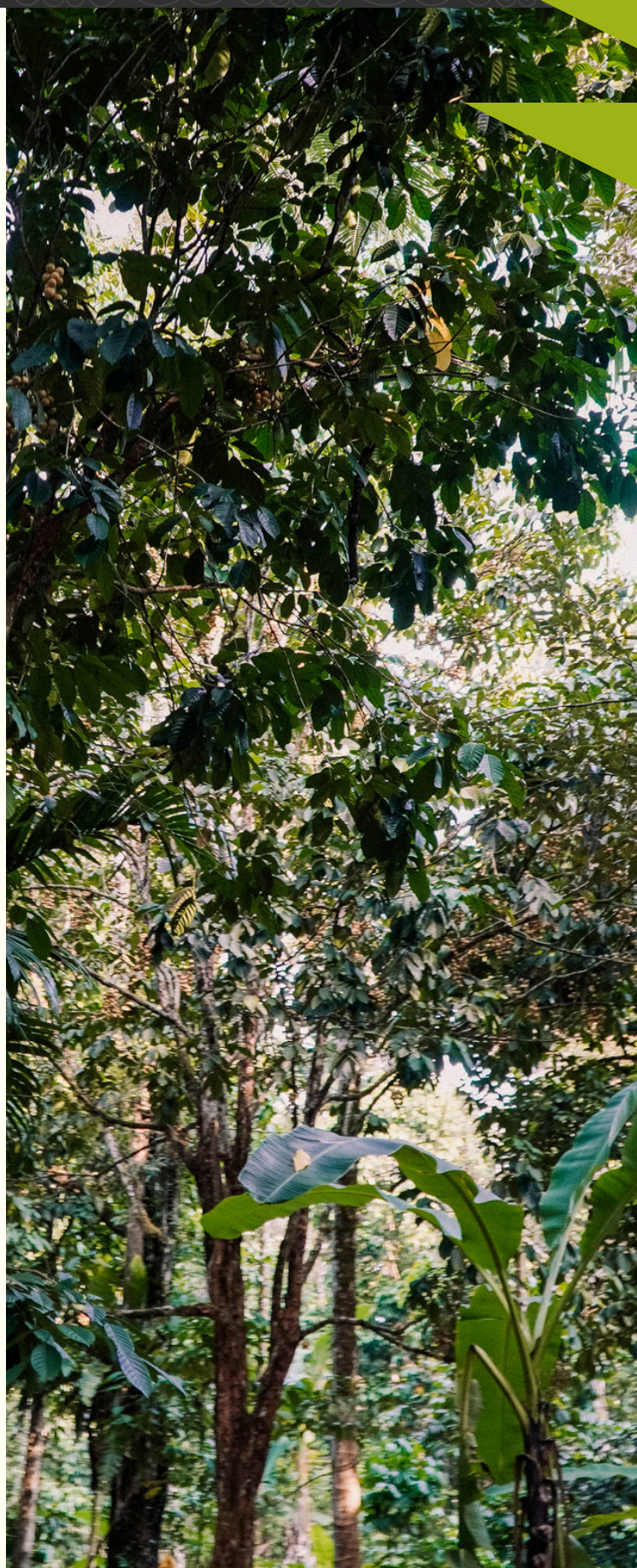
Sesi ini akan mengeksplorasi bagaimana komitmen No Deforestation, No Peatland, and No Exploitation (NDPE) diterjemahkan ke dalam praktik di berbagai rantai pasok komoditas dan lanskap produksi. Sesi ini akan mempertemukan pengalaman dari perusahaan, pemerintah, produsen, masyarakat, dan mitra lainnya, dengan contoh dari Peru, Meksiko, dan Indonesia.

Diskusi akan membahas berbagai pendekatan terhadap pengadaan yang bertanggung jawab dan produksi komoditas berkelanjutan, termasuk keterlibatan rantai pasok, dukungan bagi produsen, keterlacakan, akses pasar, dan kolaborasi pada tingkat lanskap. Diskusi juga akan mempertimbangkan tantangan praktis dalam menerapkan komitmen NDPE di berbagai pasar dan konteks lokal, serta bagaimana berbagai aktor dapat bekerja sama untuk mengatasinya.

Sesi ini bertujuan untuk:

- **Mengeksplorasi bagaimana komitmen NDPE diterapkan pada berbagai rantai pasok komoditas dan lanskap.**
- **Menyoroti peran perusahaan, pemerintah, produsen, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung produksi yang bertanggung jawab.**
- **Berbagi pendekatan untuk keterlibatan produsen, pengadaan yang bertanggung jawab, keterlacakan, dan rantai pasok berkelanjutan.**
- **Membahas tantangan dan peluang praktis untuk memperkuat implementasi NDPE dan kolaborasi.**

Kasus-kasus berikut menyajikan perspektif yang berbeda mengenai implementasi NDPE, mulai dari pemantauan yurisdiksi dan pendekatan skala lanskap hingga keterlibatan produsen dan inisiatif rantai pasok perusahaan.



NDPE untuk Komoditas Berkelanjutan

Pengalaman dan Pendekatan untuk Memajukan NDPE dalam Rantai Pasok Komoditas Berkelanjutan

1.Perspektif Pembeli: Permintaan Global untuk Komoditas Berkelanjutan

CDP merupakan sistem pengungkapan lingkungan global yang memungkinkan perusahaan, lembaga keuangan, dan organisasi lainnya untuk mengukur, mengelola, dan mengungkapkan dampak serta risiko lingkungan mereka. Melalui kerangka pengungkapannya, CDP mengumpulkan informasi mengenai isu-isu termasuk perubahan iklim, ketahanan air, dan deforestasi, sehingga memberikan investor, perusahaan, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya visibilitas yang lebih besar terhadap risiko lingkungan dan aksi perusahaan di seluruh rantai pasok global.

Dalam konteks komoditas berkelanjutan, meningkatnya ekspektasi dari investor, pembeli, regulator, dan konsumen memberikan tekanan yang semakin besar kepada perusahaan untuk mengidentifikasi dan menangani deforestasi serta risiko lingkungan lainnya dalam rantai pasok mereka. Pekerjaan CDP memberikan wawasan mengenai bagaimana pengungkapan perusahaan, transparansi rantai pasok, dan ekspektasi pasar dapat memengaruhi keputusan bisnis serta menciptakan permintaan terhadap produksi komoditas yang lebih berkelanjutan. Perspektif ini menyoroti peran pasar global dalam mendorong pengadaan yang bertanggung jawab dan memperkuat akuntabilitas di seluruh rantai pasok komoditas.

Bacaan lebih lanjut: https://www.cdp.net/en/insights/global-forests-report-2024

2.Guardian Forestal: Pendekatan Lanskap Yurisdiksi untuk Produksi Komoditas Berkelanjutan dan Perlindungan Hutan

Guardian Forestal merupakan inisiatif pemantauan hutan yurisdiksi di Michoacán, Meksiko, yang dirancang untuk memperkuat perlindungan hutan sekaligus mendukung produksi komoditas pertanian berkelanjutan, khususnya di lanskap penghasil alpukat. Inisiatif ini menggunakan informasi geospasial, pemantauan satelit, dan data lingkungan untuk mengidentifikasi deforestasi dan perubahan penggunaan lahan, sehingga menyediakan basis bukti yang lebih kuat untuk memahami dan mengelola risiko lingkungan yang terkait dengan produksi komoditas.

Inisiatif ini menunjukkan bagaimana pendekatan yurisdiksi atau lanskap dapat mendukung produksi komoditas yang bertanggung jawab dan komitmen NDPE. Dengan menyediakan informasi tingkat lanskap yang andal, otoritas pemerintah dapat memperkuat tata kelola lingkungan sekaligus memungkinkan perusahaan dan produsen menilai risiko pengadaan dengan lebih baik. Hal ini menciptakan dasar bagi kolaborasi antara pemerintah, produsen, dan pembeli sektor swasta untuk menyelaraskan produksi komoditas dengan tujuan perlindungan hutan.

Bacaan lebih lanjut: **https://pfa.guardianforestal.org/**

NDPE untuk Komoditas Berkelanjutan

Pengalaman dan Pendekatan untuk Memajukan NDPE dalam Rantai Pasok Komoditas Berkelanjutan

3.Koalisi untuk Produksi Berkelanjutan di Amazon Peru

Business Alliance for the Amazon (AEA) merupakan platform yang dipimpin oleh Conservation International Peru dan USAID untuk mendorong usaha dan investasi berkelanjutan di seluruh Amazon Peru. Aliansi ini bekerja dengan dunia usaha, produsen, investor, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat lokal dan Masyarakat Adat untuk mengembangkan dan memperluas model bisnis yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, serta meningkatkan penghidupan lokal. Huánuco merupakan salah satu wilayah tempat Aliansi bekerja untuk memperkuat usaha berkelanjutan dan menciptakan kondisi bagi investasi hijau.

Di Huánuco, Aliansi bekerja sama dengan pemerintah regional untuk mendorong usaha dan investasi berkelanjutan yang terkait dengan konservasi dan pembangunan ekonomi lokal. Pendekatan ini mencakup bantuan teknis, mekanisme pembiayaan, peluang pasar, dan kolaborasi antara aktor publik dan swasta. Contohnya termasuk dukungan untuk kopi berkelanjutan, produk agroekologis, perlebahan, dan usaha bio- serta ekobisnis lainnya, termasuk inisiatif di sekitar lanskap Carpish. Upaya ini bertujuan memperkuat rantai nilai berkelanjutan sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang selaras dengan konservasi hutan dan ekosistem.
Bacaan lebih lanjut: https://impactousaidperu.org/alianza-empresarial-por-la-amazonia/

4.Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi penghasil kelapa sawit utama di Indonesia, dengan petani kecil memainkan peran penting dalam sektor ini. Upaya mendorong kelapa sawit berkelanjutan di provinsi ini semakin berfokus pada peningkatan tata kelola perkebunan, penguatan kapasitas petani, peningkatan produktivitas pada perkebunan yang sudah ada, serta penanganan risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan produksi kelapa sawit. Upaya ini semakin relevan karena produsen dan perusahaan menghadapi ekspektasi yang meningkat terkait rantai pasok bebas deforestasi, keterlacakan, dan pengadaan yang bertanggung jawab.

Inisiatif di Kalimantan Tengah mempertemukan pemerintah provinsi dan kabupaten, perusahaan, petani kecil, organisasi masyarakat sipil, serta mitra lainnya untuk memperkuat produksi kelapa sawit berkelanjutan dan meningkatkan akses petani ke pasar. Pendekatan yang digunakan mencakup pengorganisasian dan penguatan kapasitas petani, praktik produksi berkelanjutan, keterlacakan, serta keterlibatan antara produsen dan pembeli di hilir. Dengan meningkatkan kapasitas petani kecil dan memperkuat hubungan antara wilayah produksi dan pasar, upaya ini dapat mendukung rantai pasok kelapa sawit yang lebih bertanggung jawab sekaligus mempertahankan pentingnya komoditas ini bagi perekonomian masyarakat lokal.

NDPE untuk Komoditas Berkelanjutan

Pengalaman dan Pendekatan untuk Memajukan NDPE dalam Rantai Pasok Komoditas Berkelanjutan

5.Komoditas Karet Berkelanjutan yang Selaras dengan EUDR

Inisiatif Rubber Development dari Olam Agri memberikan contoh bagaimana produksi komoditas berkelanjutan dapat diselaraskan dengan persyaratan regulasi internasional yang berkembang, khususnya European Union Deforestation Regulation (EUDR). Melalui keterlibatan dengan produsen karet dan mitra rantai pasok, inisiatif ini berfokus pada penguatan produksi yang bertanggung jawab, keterlacakan, dan transparansi rantai pasok, sekaligus mendukung petani dalam memenuhi persyaratan keberlanjutan yang terus berkembang. Hal ini sangat relevan bagi rantai pasok karet, karena produsen kecil sering menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan keterlacakan dan uji tuntas yang baru.

Pengalaman ini menunjukkan bagaimana keterlibatan perusahaan dalam rantai pasok dapat mendukung pengadaan yang bertanggung jawab sekaligus kepatuhan terhadap regulasi. Dengan bekerja secara langsung dengan produsen dan memperkuat keterlacakan serta uji tuntas, perusahaan dapat membantu menangani risiko deforestasi sekaligus mempertahankan akses ke pasar internasional. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana persyaratan sektor swasta seperti NDPE dan EUDR dapat menjadi pendorong bagi bantuan teknis, keterlibatan petani, dan produksi komoditas yang lebih berkelanjutan.

Bacaan lebih lanjut: **https://www.olamagri.com/products-services/rubber**

6.Produksi Sapi Regeneratif untuk Pertanian Berkelanjuta

Caquetá, Kolombia, merupakan wilayah penghasil sapi utama di Amazon Kolombia, tempat produksi peternakan ekstensif secara historis berkaitan erat dengan perluasan padang penggembalaan dan hilangnya hutan. Sebagai respons, petani, lembaga pemerintah, organisasi penelitian, dan mitra pembangunan telah mendukung transisi menuju model produksi yang lebih berkelanjutan dan regeneratif. Pendekatan tersebut mencakup sistem silvopastoral, penggembalaan bergilir, pengelolaan padang rumput yang lebih baik, pagar hidup, bank pakan, serta restorasi dan konservasi kawasan hutan di dalam lanskap produktif.

Pengalaman ini menunjukkan bagaimana produksi peternakan dapat diubah dari pendorong konversi hutan menjadi sistem penggunaan lahan yang lebih produktif dan berkelanjutan secara lingkungan. Dengan mengintegrasikan pepohonan dan pengelolaan padang rumput yang lebih baik, sistem peternakan berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas usaha tani, kesehatan tanah, keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, dan kesejahteraan hewan sekaligus mengurangi tekanan untuk memperluas padang penggembalaan ke kawasan hutan. Bukti terbaru dari Caquetá menunjukkan bahwa penerapan sistem silvopastoral dapat mengurangi deforestasi sekaligus memberikan dampak positif terhadap produktivitas ternak dan pendapatan usaha tani. Pengalaman ini juga menyoroti pentingnya bantuan teknis, pembelajaran antarpetani, insentif keuangan, dan peluang pasar untuk memungkinkan produsen mengadopsi dan memperluas praktik regeneratif.

Bacaan lebih lanjut: https://www.ilri.org/knowledge/publications/ruta-de-aprendizaje-transicion-hacia-una-ganaderia-silvopastoril-sostenible

7. Produksi Berkelanjutan di Hutan Peru Utara – La Libertad, Peru

Hutan Peru Utara, khususnya hutan kering La Libertad, merupakan ekosistem penting yang mendukung keanekaragaman hayati, pengaturan air, penghidupan masyarakat, dan produksi pertanian. Pada saat yang sama, lanskap ini menghadapi tekanan yang semakin besar akibat perubahan penggunaan lahan, praktik produksi yang tidak berkelanjutan, degradasi hutan, dan perubahan iklim. Mengatasi tantangan tersebut membutuhkan pendekatan yang memperkuat konservasi hutan sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang layak bagi masyarakat lokal.

Di La Libertad, konservasi dan produksi berkelanjutan semakin dipandang sebagai tujuan yang saling melengkapi. Upaya difokuskan pada pemulihan dan perlindungan ekosistem hutan sekaligus mendorong sistem produksi pertanian, peternakan, dan berbasis hutan yang lebih berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan rantai nilai lokal, peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan, dan penciptaan insentif bagi masyarakat serta produsen untuk mempertahankan tutupan hutan dan jasa ekosistem. Elemen penting dari pendekatan ini adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah regional dan lokal, masyarakat, produsen, organisasi Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, pelaku sektor swasta, serta pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut dapat membantu menyelaraskan prioritas konservasi dengan kebutuhan pembangunan lokal, meningkatkan tata kelola wilayah, dan memobilisasi sumber daya teknis serta keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan inisiatif produksi berkelanjutan dan restorasi.

Pengalaman La Libertad menunjukkan pentingnya bergerak melampaui pendekatan yang hanya berfokus pada konservasi menuju pengelolaan lanskap terpadu, di mana perlindungan hutan, restorasi, produksi berkelanjutan, dan pembangunan ekonomi lokal saling memperkuat. Pengalaman ini juga menyoroti peluang dan tantangan dalam memperluas pendekatan tersebut ke kawasan hutan Peru Utara yang lebih luas

Bertemu Para Delegasi



Bertemu Delegasi: **Indonesia**





Syahrina D. Anggraini
Sekertariat GCF Task Force – Indonesia

Syahrina Dyah Anggraini adalah Country Director untuk Indonesia pada Governors' Climate and Forests Task Force (GCF Task Force). Ia merupakan spesialis perubahan iklim dengan pengalaman lebih dari dua dekade dalam inventarisasi gas rumah kaca (GRK), pengembangan proyek karbon, REDD+, kebijakan iklim, dan pembiayaan iklim di seluruh sektor IPCC. Ia berkontribusi pada pengembangan inventarisasi GRK nasional dan National Communications untuk Indonesia dan Timor-Leste. Dalam perannya saat ini, ia mengoordinasikan inisiatif GCF Task Force di Indonesia, mendorong kolaborasi antara pemerintah dan mitra untuk memajukan konservasi hutan, pembangunan berkelanjutan, dan aksi iklim.

Prof. Daddy Ruhiyat
Delegasi GCF Task Force - East Kalimantan

Prof. Dr. Ir. Daddy Ruhiyat, M.Sc. adalah Profesor Ilmu Tanah Hutan pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Indonesia. Ia meraih gelar Master of Science dalam bidang Kehutanan dari Kyoto University, Jepang, dan melanjutkan studi kehutanan tingkat lanjut di Goettingen, Jerman. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur dan merupakan anggota Executive Committee Governors' Climate and Forests Task Force (GCF Task Force) yang mewakili Indonesia. Sebelumnya, ia menjadi Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Isu Lingkungan. Karyanya berfokus pada REDD+, pendekatan yurisdiksi, dan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan untuk konservasi hutan dan pembangunan rendah emisi.

Bertemu Delegasi: **Indonesia**





Dedek Hadi Ismanto
Delegasi GCF Task Force – Aceh, Indonesia

Dedek Hadi Ismanto, S.Hut., M.Si. adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (DLHK Aceh), Indonesia. Ia memiliki pengalaman dalam perencanaan kehutanan, inventarisasi hutan, dan pengelolaan kawasan hutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris DLHK Aceh dan Sub-Koordinator Inventarisasi dan Perencanaan Hutan pada Bidang Perencanaan Kehutanan. Dalam perannya saat ini, ia mendukung perencanaan kehutanan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di Aceh.

Fauzan Nur
Delegasi GCF Task Force – Aceh, Indonesia

Fauzan Nur, S.Hut., M.Si. adalah Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, dengan fokus pada perencanaan infrastruktur dan pembangunan daerah. Ia meraih gelar Sarjana Manajemen Hutan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Banda Aceh dan Magister Budidaya Hutan dari IPB University. Ia memiliki pengalaman luas dalam kehutanan, pengelolaan lingkungan, dan perencanaan pembangunan daerah, dengan pernah menduduki berbagai posisi di instansi kehutanan dan lingkungan Aceh serta Bappeda Aceh. Pekerjaannya mencakup pemantauan dan evaluasi kehutanan, pengelolaan lingkungan dan bencana, serta perencanaan pembangunan.

Bertemu Delegasi: **Indonesia**





Adi Yani
Delegasi GCF Task Force - West Kalimantan

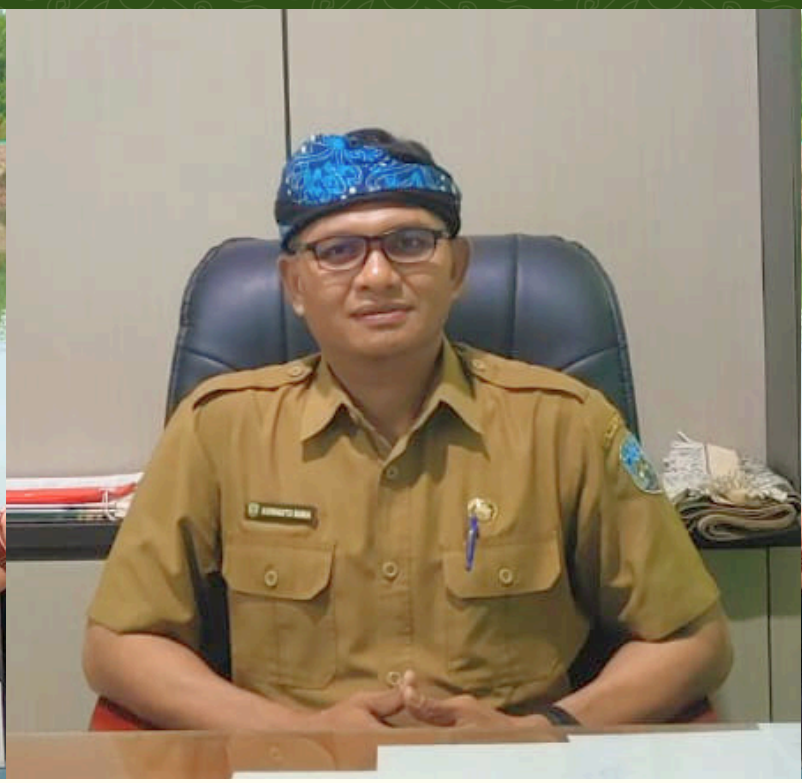
Ir. H. Adi Yani, M.H. adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ia meraih gelar Sarjana Pertanian dan Magister Hukum dari Universitas Tanjungpura. Ia memimpin upaya provinsi untuk memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan lingkungan, dan ketangguhan iklim. Melalui tata kelola lingkungan yang terintegrasi dan kolaborasi dengan instansi pemerintah, masyarakat lokal, serta pemangku kepentingan lainnya, ia mendukung pengelolaan lanskap hutan Kalimantan Barat secara berkelanjutan sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan rendah emisi.

Prof. Gusti Hardiansyah
Delegasi GCF Task Force - West Kalimantan

Prof. Dr. Ir. Gusti Hardiansyah, M.Sc., QAM., IPU. adalah Profesor Manajemen Hutan di Universitas Tanjungpura, Indonesia, dan menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja REDD+ Kalimantan Barat. Ia juga merupakan anggota Executive Committee Governors' Climate and Forests Task Force (GCF Task Force) yang mewakili Indonesia. Sepanjang kariernya, ia berkontribusi pada tata kelola hutan, REDD+, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan kebijakan iklim, serta mendukung integrasi penelitian ilmiah ke dalam pengambilan keputusan daerah. Karyanya mendorong pendekatan kolaboratif untuk konservasi hutan, pembangunan rendah emisi, dan pengelolaan lanskap berkelanjutan di Kalimantan Barat dan wilayah lainnya.

Bertemu Delegasi: **Indonesia**





Hairul Anwar
Delegasi GCF Task Force - North Kalimantan

Hairul Anwar, S.Hut., M.A.P. adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Ia meraih gelar Sarjana Kehutanan dan Magister Administrasi Publik. Sebelum menduduki jabatan saat ini, ia bertugas di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan berkontribusi pada tata kelola provinsi serta administrasi publik. Saat ini ia memimpin kebijakan dan program perlindungan lingkungan, pengendalian pencemaran, ketangguhan iklim, dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan secara lingkungan di Kalimantan Utara.

Ridwanto Suma
GCF-TF Delegates - North Kalimantan

Ridwanto Suma, S.Hut adalah seorang pejabat kehutanan asal Kalimantan Utara, Indonesia, yang berpengalaman dalam memfasilitasi inisiatif perhutanan sosial, menangani konflik hutan adat, dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Pekerjaannya berfokus pada fasilitasi usulan perhutanan sosial, dukungan penyelesaian konflik terkait hutan adat, serta penguatan kapasitas masyarakat guna meningkatkan peluang ekonomi lokal. Ia juga berkontribusi pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi penyuluh kehutanan, dengan membantu memperkuat kemampuan mereka dalam mendampingi masyarakat terkait pengelolaan hutan berkelanjutan dan pengembangan mata pencaharian. Melalui perannya, ia bekerja sama erat dengan masyarakat setempat dan para pemangku kepentingan terkait untuk mendorong pendekatan tata kelola hutan dan pembangunan berkelanjutan yang inklusif serta berbasis masyarakat di Kalimantan Utara.

Bertemu Delegasi: **Indonesia**





Makhbub Indra Pratama
GCF-TF Delegates - Central Kalimantan

Maktub menjabat sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Kalimantan Tengah, sebuah badan koordinasi yang berfokus pada penguatan aksi iklim daerah dan tata kelola hutan berkelanjutan. Melalui peran ini, ia mendukung pelaksanaan fungsi kelompok kerja dalam mendorong program-program strategis tingkat provinsi, termasuk pelaksanaan program *Results-Based Payment* (RBP) REDD+ *Output* 2 dari *Green Climate Fund* (GCF) serta pengembangan REDD+ berbasis yurisdiksi di Kalimantan Tengah.

Domingos Neves JDC
Delegasi GCF Task Force - Central Kalimantan

Domingos Neves JDC adalah Analis Kebijakan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Ia meraih gelar di bidang kehutanan dari Universitas PGRI Palangka Raya dan Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari Universitas Palangka Raya. Ia telah bekerja di sektor kehutanan selama lebih dari dua dekade dan terlibat dalam inisiatif REDD+ sejak 2012, termasuk perencanaan pembangunan kehutanan dan perancangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Tengah. Sejak 2016, ia bekerja di sektor perkebunan dengan mendukung pemetaan lahan, sertifikasi ISPO dan RSPO, serta pengembangan perkebunan yang berkelanjutan dan produktif.

Bertemu Delegasi: **Indonesia**





Estiko Tri Wiradyo
Delegasi GCF Task Force - Papua

Dr. Estiko Tri Wiradyo, S.H., M.Si. menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua. Dengan latar belakang pendidikan kehutanan dan pengalaman lebih dari tiga dekade di sektor kehutanan Papua, ia telah menduduki berbagai posisi teknis dan kepemimpinan sejak 1992. Sebagai mantan anggota Executive Committee GCF Task Force Indonesia dan Delegasi GCF Task Force Papua yang aktif, ia berkontribusi pada kolaborasi regional dan internasional mengenai tata kelola hutan, aksi iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Karyanya berfokus pada perencanaan strategis, pengembangan kelembagaan, dan koordinasi kebijakan untuk memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan ketangguhan iklim di Papua.

Leny Sonya Dominggas Baho
Delegasi GCF Task Force - Papua

Leni Sonya D. Baho merupakan staf pada Seksi Penggunaan dan Pemetaan Lahan Hutan di bawah Bidang Perencanaan Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Indonesia. Ia mendukung perencanaan kehutanan, pemetaan kawasan hutan, dan pengelolaan data spasial, serta analisis teknis terkait sumber daya hutan dan penggunaan lahan. Ia juga berkontribusi dalam kegiatan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan di Provinsi Papua.

Bertemu Delegasi: **Indonesia**





Prof. Charlie Heatubun
Delegasi GCF Task Force - West Papua

Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si., FLS adalah Profesor Botani Hutan di Universitas Papua dan menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Papua Barat. Sebagai Fellow of the Linnean Society of London dan ahli botani yang diakui secara internasional, ia telah mendedikasikan kariernya pada penelitian keanekaragaman hayati, konservasi hutan, dan pembangunan berkelanjutan di Papua. Sebagai anggota Executive Committee Governors' Climate and Forests Task Force (GCF Task Force), ia mendorong kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, pendekatan yurisdiksi, dan kemitraan yang mendukung ketangguhan iklim serta pembangunan yang positif bagi alam.

Haerul Arifin
GCF-TF Delegates - West Papua

Haerul Anwar menjabat sebagai Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Papua Barat, Indonesia. Fokus pekerjaannya meliputi penelitian terkait pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pembangunan wilayah dan infrastruktur. Ia terlibat dalam Kelompok Kerja Mangrove Papua Barat, Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi, dan Forum Pengelolaan Lanskap Terpadu untuk kawasan *Crown Jewel of Papua*. Selain itu, ia berperan sebagai penghubung utama (*focal point*) untuk kerja sama penelitian dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional, termasuk Royal Botanic Gardens, Kew; National University of Singapore; WWF Indonesia; Universitas Papua; dan WRI Indonesia.

Bertemu Delegasi: **Bolivia**



Bolivia memiliki salah satu lanskap hutan terbesar dan paling beragam di Amerika Selatan, yang mencakup hutan hujan Amazon, Hutan Kering Chiquitano, Gran Chaco, dan ekosistem Andes. Hutan mencakup hampir setengah wilayah negara dan mendukung keanekaragaman hayati yang luar biasa, cadangan karbon yang signifikan, serta penghidupan banyak Masyarakat Adat dan masyarakat perdesaan. Ekosistem Bolivia yang beragam juga berperan penting dalam pengaturan iklim regional dan perlindungan daerah aliran sungai.

Bolivia memiliki sejarah panjang pengelolaan hutan berbasis masyarakat, di mana Masyarakat Adat dan masyarakat lokal memainkan peran utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Upaya memperkuat produksi berkelanjutan, tata kelola hutan, dan restorasi lanskap terus mendukung konservasi keanekaragaman hayati sekaligus pembangunan perdesaan di seluruh negeri.





Gonzalo Avila-Sanchez
Delegasi GCF Task Force – Tarija

Gonzalo Ávila adalah ilmuwan politik Bolivia dengan gelar Magister Ilmu Politik. Pada 2018, ia menerima beasiswa dari Georgetown University melalui Global Leadership and Competitiveness Program dan diakui sebagai salah satu finalis dari 34 peserta Amerika Latin atas proyek pengembangan demokrasi yang diusulkannya. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade dalam komunikasi politik, ia memimpin studi opini publik, strategi pemilu, dan kampanye komunikasi pemerintah di tingkat kota, regional, dan nasional di Bolivia dan Paraguay. Ia juga merupakan salah satu pendiri Gran Reserva dan Fábula, inisiatif yang mendukung industri anggur Bolivia. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Departemen Tarija.

María Angelica Calvo Kirigin
Sekertariat GCF Task Force – Tarija

María Angelica Calvo Kirigin menjabat sebagai Koordinator Pengembangan Bisnis dan Pemasaran untuk Bioekonomi di Fundación Natura. Pekerjaannya berfokus pada promosi dan komersialisasi produk berkelanjutan yang dikembangkan oleh masyarakat lokal dan Masyarakat Adat, dengan menghubungkan konservasi keanekaragaman hayati dengan peluang ekonomi yang inklusif. Ia mendukung berbagai inisiatif yang menonjolkan nilai pengetahuan tradisional, produksi yang bertanggung jawab, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, membantu memperkuat akses pasar bagi usaha berbasis masyarakat sekaligus berkontribusi pada konservasi ekosistem dan penghidupan berkelanjutan.

Bertemu Delegasi: **Brazil**

Situated along the Gulf of Guinea, Nigeria is home to a wide variety of ecosystems, including tropical rainforests, mangrove forests, freshwater wetlands, woodlands, and savannas. These landscapes support rich biodiversity and provide essential ecosystem services such as water regulation, soil protection, and climate resilience. They also serve as an important source of food, energy, and income for millions of people across the country.

As Africa's most populous nation, Nigeria faces growing pressure on its natural resources while balancing economic development and environmental sustainability. In response, the country has expanded efforts in landscape restoration, sustainable land management, and ecosystem conservation through partnerships involving government institutions, local communities, the private sector, and international partners.





Carlos Enrique Aragon Castillo
Delegasi GCF Task Force – Brazil

Carlos Enrique Aragon Castillo adalah Country Director untuk Brasil pada Governors' Climate and Forests Task Force (GCF Task Force). Ia memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun dalam konservasi dan aksi iklim di Hutan Hujan Brasil serta lebih dari dua dekade bekerja di kawasan Amazon secara keseluruhan. Keahliannya mencakup pembangunan berkelanjutan, transisi penggunaan lahan, pengurangan emisi, konservasi keanekaragaman hayati, ekonomi lingkungan, dan Payment for Environmental Services (PES). Ia juga memiliki pengalaman luas dalam pembiayaan iklim, strategi yurisdiksi, dan kemitraan yang menghubungkan pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memajukan tata kelola hutan berkelanjutan dan aksi iklim transformatif.

Alex Sandro Antônio Marega
Delegasi GCF Task Force - Mato Grosso

Alex Sandro Antônio Marega adalah Sekretaris Eksekutif Bidang Lingkungan pada Sekretariat Lingkungan Negara Bagian Mato Grosso (SEMA-MT), Brasil. Ia meraih gelar Magister Ekonomi dari Federal University of Mato Grosso (UFMT) serta MBA dalam Manajemen Strategis dan Value Investing. Dengan pengalaman 20 tahun dalam berbagai posisi kepemimpinan di Pemerintah Mato Grosso, pekerjaannya mencakup manajemen publik, perencanaan, keuangan, lingkungan, dan keberlanjutan. Ia mengoordinasikan rencana pencegahan deforestasi dan kebakaran hutan Mato Grosso (PPCDIF-MT) serta Program REM, dan memegang peran kepemimpinan dalam berbagai inisiatif REDD+, perubahan iklim, perikanan, dan pembangunan berkelanjutan, serta mewakili Mato Grosso dalam GCF Task Force.

Bertemu Delegasi: **California (Amerika)**



California memiliki keragaman lanskap yang luar biasa, mulai dari hutan redwood purba dan Pegunungan Sierra Nevada hingga hutan mediterania, lahan basah pesisir, gurun, dan lembah pertanian yang subur. Ekosistem tersebut mendukung keanekaragaman hayati yang kaya dan menyediakan jasa ekosistem penting, termasuk pasokan air, penyimpanan karbon, ketangguhan terhadap kebakaran hutan, dan habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan satwa.

Sebagai salah satu ekonomi subnasional terbesar di dunia, California telah lama berada di garis depan kebijakan iklim dan lingkungan. Program Cap-and-Invest yang inovatif menunjukkan bagaimana mekanisme berbasis pasar dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus menghasilkan pendanaan jangka panjang untuk energi bersih, restorasi ekosistem, dan ketangguhan masyarakat. California juga aktif dalam kemitraan internasional yang mendukung konservasi hutan tropis dan aksi iklim berbasis yurisdiksi.



Shannon Dilley
Delegasi GCF Task Force – California

Dr. Shannon Dilley adalah Chief Counsel pada California Air Resources Board (CARB), tempat ia memberikan kepemimpinan hukum terkait kebijakan iklim, udara bersih, dan lingkungan. Ia bergabung dengan Legal Office CARB pada 2015 dan sebelumnya menjabat sebagai Assistant Chief Counsel, memberikan nasihat mengenai penegakan hukum dan litigasi, termasuk kasus-kasus besar terkait penegakan regulasi kendaraan. Sebagai anggota Abenaki Tribe of Vermont, ia turut membantu membentuk CARB Tribal Program dan sebelumnya menjabat sebagai Tribal Liaison. Ia juga merupakan delegasi California pada Governors' Climate and Forests Task Force (GCF Task Force), mendorong kolaborasi dalam kebijakan iklim, perlindungan hutan, dan pendekatan yurisdiksi. Ia memiliki gelar juris doctor, master hukum lingkungan, dan LLM dengan fokus pada perubahan iklim.

Bertemu Delegasi: **Colombia**



Kolombia memiliki lima wilayah alam yang berbeda: Amazon, Andes, Karibia, Pasifik, dan Orinoco. Geografi yang unik ini menciptakan keragaman ekosistem yang luar biasa, mulai dari hutan hujan tropis dan hutan awan hingga lahan basah dan habitat pesisir. Lanskap tersebut mendukung keanekaragaman hayati yang luar biasa sekaligus menyediakan air tawar, menyimpan karbon, dan menopang penghidupan serta warisan budaya Masyarakat Adat dan masyarakat keturunan Afrika.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kolombia semakin mengaitkan konservasi hutan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain upaya mengurangi deforestasi dan memulihkan lanskap terdegradasi, negara ini mendorong bioekonomi sebagai cara menciptakan peluang penghidupan baru sekaligus mempertahankan ekosistem yang sehat. Inisiatif tersebut didukung melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, Masyarakat Adat, sektor swasta, dan mitra pembangunan.



Juan Pablo Jaramillo Murcia
Delegasi GCF Task Force – Caquetá

Juan Pablo Jaramillo Murcia adalah Sekretaris Lingkungan dan Pertanian Departemen Caquetá, Kolombia. Sebagai insinyur lingkungan yang berspesialisasi dalam Hukum Lingkungan serta Perumusan dan Evaluasi Proyek, pekerjaannya berfokus pada pengelolaan lingkungan, bioekonomi, dan pembangunan berkelanjutan di Amazon Kolombia. Ia memimpin berbagai inisiatif terkait pengembangan kebijakan publik, penguatan organisasi perdesaan, perumusan proyek, dan kolaborasi antara instansi pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan mitra internasional. Karyanya menghubungkan konservasi lingkungan dengan peluang ekonomi berkelanjutan dan pembangunan wilayah, mendukung konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan penghidupan berkelanjutan di Caquetá.

Bertemu Delegasi: **Ekuador**



Meskipun berukuran relatif kecil, Ekuador diakui sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan memiliki keanekaragaman hayati per kilometer persegi tertinggi dibandingkan negara mana pun. Lanskapnya membentang dari hutan hujan Amazon dan hutan awan Andes hingga ekosistem pesisir dan Kepulauan Galápagos, menciptakan tingkat kekayaan biologis dan endemisme yang luar biasa. Keragaman ekologis ini menjadikan Ekuador sebagai salah satu prioritas global untuk konservasi keanekaragaman hayati dan solusi berbasis alam.

Ekuador semakin menempatkan keanekaragaman hayati sebagai aset strategis bagi pembangunan berkelanjutan. Negara ini terus memajukan kebijakan dan inisiatif yang mendorong konservasi ekosistem, produksi berkelanjutan, restorasi ekologis, dan pembiayaan berbasis alam, sekaligus mengakui pentingnya peran Masyarakat Adat dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam.



Bruno Santiago Paladines Puertas
Sekertariat GCF Task Force-Ekuador

Bruno Santiago Paladines Puertas, M.Sc. adalah Koordinator Negara untuk Ekuador pada Governors' Climate and Forests Task Force (GCF Task Force) dan Koordinator Amazonian Platform for Forests, Climate, and Human Well-being di Ekuador. Dengan latar belakang Ekologi Manusia, pekerjaannya berfokus pada konservasi subnasional dan tata kelola kolaboratif antara pemerintah dan Masyarakat Adat, serta mekanisme pembiayaan inovatif, penghidupan berkelanjutan, dan sistem produksi leluhur. Ia mendorong pendekatan yurisdiksi yang menghubungkan konservasi hutan dengan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung konservasi lebah asli dan habitatnya.

Bertemu Delegasi: **Mexico**



Geografi Meksiko yang beragam membentang dari gurun kering di utara hingga hutan hujan tropis di selatan, mencakup hutan beriklim sedang, hutan awan, mangrove, dan ekosistem pesisir yang luas. Rentang habitat yang luar biasa ini mendukung salah satu tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, dengan ribuan spesies tumbuhan dan satwa endemik. Hutan juga menyediakan jasa ekosistem penting, termasuk pasokan air tawar, penyimpanan karbon, dan perlindungan terhadap degradasi lahan.

Meksiko telah dikenal secara internasional melalui model perhutanan masyarakatnya, di mana Masyarakat Adat dan masyarakat lokal mengelola sebagian besar hutan negara melalui ejidos dan perusahaan kehutanan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana pengelolaan hutan berkelanjutan dapat menghasilkan manfaat ekonomi lokal sekaligus memperkuat tata kelola dan melestarikan ekosistem alam.





Alejandro Méndez López
Delegasi GCF Task Force – Michoacán

Dr. Alejandro Méndez López adalah Sekretaris Lingkungan Negara Bagian Michoacán, Meksiko. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Magister Administrasi Publik dari CIDE, dan Ph.D. bidang Pemerintahan dengan spesialisasi Kebijakan Lingkungan dari University of Essex, Inggris. Ia memiliki pengalaman luas dalam tata kelola lingkungan, kehutanan, dan administrasi publik, termasuk sebagai peneliti, legislator daerah, dan Direktur State Forestry Commission. Ia juga pernah menjadi anggota berbagai dewan lingkungan dan kehutanan dan saat ini memimpin kebijakan lingkungan serta upaya pembangunan berkelanjutan Michoacán.

Neyra Silva
Delegasi GCF Task Force – Yucatán

Neyra Concepción Silva Rosado menjabat sebagai Sekretaris Pembangunan Berkelanjutan Negara Bagian Yucatán, Meksiko, sejak April 2025. Ia memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam konservasi sumber daya alam, pengelolaan berbasis masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Pekerjaannya mencakup pengelolaan air, restorasi ekosistem, konservasi satwa liar, pendidikan lingkungan, dan partisipasi masyarakat di Yucatán dan semenanjung yang lebih luas. Ia telah bekerja bersama organisasi masyarakat sipil, masyarakat, dan lembaga publik untuk mengembangkan strategi konservasi dan memperkuat kolaborasi. Ia juga berkontribusi pada inisiatif seperti Herencia Maya, sebuah kemitraan berbasis konservasi yang menghubungkan perlindungan hutan, warisan budaya Maya, dan penghidupan berkelanjutan.

Bertemu Delegasi: **Peru**



Peru memiliki bagian terbesar kedua dari hutan hujan Amazon setelah Brasil, dengan hutan mencakup hampir 60 persen wilayah nasionalnya. Bersama Pegunungan Andes, ekosistem pesisir Pasifik, dan padang rumput dataran tinggi, Peru diakui sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Ekosistemnya yang kaya mendukung keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk ribuan spesies endemik, sekaligus menyediakan jasa ekosistem penting seperti penyimpanan karbon, pengaturan air tawar, dan habitat bagi Masyarakat Adat dan masyarakat lokal.

Peru terus memajukan kebijakan dan inisiatif yang mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi ekosistem, dan pembangunan perdesaan yang inklusif. Melalui kolaborasi antara lembaga pemerintah, Masyarakat Adat, masyarakat lokal, dan mitra pembangunan, negara ini memperkuat upaya konservasi hutan sekaligus mendukung penghidupan yang tangguh dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang.



Daniel Adolfo Coronel Chamorro
Sekertariat GCF Task Force – Peru

Daniel Adolfo Coronel Chamorro adalah Konsultan Negara Peru untuk Climate Pathways Project di bawah Governors' Climate and Forests Task Force (GCF Task Force). Ia merupakan spesialis pengelolaan lingkungan dengan keahlian dalam kebijakan perubahan iklim, konservasi hutan, pengelolaan keanekaragaman hayati, rantai nilai pertanian dan kehutanan berkelanjutan, serta pembiayaan iklim. Sebelumnya, ia menjadi penasihat teknis GIZ Peru dan Wakil Koordinator GCF Task Force di Peru, mendukung kolaborasi multipihak dan inisiatif konservasi hutan subnasional. Ia juga menjabat sebagai Wakil Koordinator Tropical Forest Alliance (TFA) di Peru, yang mendorong produksi berkelanjutan dan aksi iklim yurisdiksi.

Bertemu Delegasi: **Peru**







Frank Eduardo Sánchez Romero
Delegasi GCF Task Force - La Libertad

Frank Eduardo Sánchez Romero adalah Manajer Lingkungan Regional pada Pemerintah Regional La Libertad, Peru. Ia merupakan seorang pengacara dengan gelar Magister Manajemen Publik dan memiliki pengalaman luas dalam tata kelola lingkungan, administrasi publik, dan pembangunan regional berkelanjutan. Dalam perannya saat ini, ia memimpin perumusan dan implementasi kebijakan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, perencanaan wilayah, dan inisiatif ketangguhan iklim. Ia juga mendorong kolaborasi antara instansi pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memajukan keberlanjutan lingkungan serta pembangunan yang inklusif dan tangguh terhadap iklim di seluruh wilayah La Libertad.

Luis Augusto Briceño Jara
Delegasi GCF Task Force - Huánuco

Luis Augusto Briceño Jara adalah Direktur Eksekutif Amazon Regional Commonwealth (Mancomunidad Regional Amazónica – MRA), sebuah aliansi pemerintah regional Amazon Peru yang mendorong aksi terkoordinasi untuk pembangunan berkelanjutan, konservasi hutan, dan ketangguhan iklim. Dengan latar belakang keuangan publik, ia memiliki pengalaman luas dalam manajemen publik, perencanaan strategis, pembangunan berkelanjutan, serta perancangan dan implementasi kebijakan publik. Ia juga berpengalaman memimpin tim multidisiplin dan memfasilitasi koordinasi antarpemerintah, lintas tingkat, dan lintas sektor. Melalui MRA, ia mendukung kolaborasi regional dan pembangunan inklusif rendah emisi di seluruh Amazon Peru.

Bertemu **Mitra**



Ari Suharto Yayasan Bumi Eka Lestari (BATARI)

Ari Suharto adalah Direktur Yayasan Bumi Eka Lestari (BATARI), Indonesia. Ia meraih gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat serta Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari IPB University. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di CER Indonesia, ia telah bekerja pada mekanisme perdagangan karbon, REDD+, MRV, pengurangan emisi berbasis lahan, dan pembiayaan iklim. Ia berkontribusi pada pelaporan iklim Indonesia kepada UNFCCC dan memiliki pengalaman luas dalam keterlibatan pemangku kepentingan, akuntansi karbon, dan penguatan kapasitas. Karyanya berfokus pada pengembangan praktik penggunaan lahan berkelanjutan, aksi iklim, dan tata kelola lingkungan yang inklusif.



Arif Budiman (Architecture for REDD+ Transactions (ART))

Arif Budiman adalah Senior Technical Manager pada Architecture for REDD+ Transactions (ART). Ia memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam konservasi alam, dengan keahlian di bidang Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU), karbon hutan, REDD+, dan restorasi gambut. Ia telah bekerja dengan lembaga pemerintah, mitra sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam strategi pengurangan emisi, pendekatan yurisdiksi, dan pembangunan rendah emisi. Ia juga berkontribusi pada Forest Reference Emission Level dan National Peatland Reference Emission Level Indonesia. Arif meraih gelar Magister Ekologi dari Universitas Padjadjaran dan Sarjana Kehutanan, dengan keahlian dalam akuntansi karbon terestrial dan MRV.



Björn Fondén (International Emissions Trading Association (IETA))

Björn Fondén adalah International Policy Manager dan APAC Lead pada International Emissions Trading Association (IETA). Ia bekerja pada kebijakan iklim internasional dan pengembangan pasar karbon di kawasan Asia-Pasifik, dengan fokus khusus pada Pasal 6 Perjanjian Paris, REDD+, dan solusi iklim berbasis alam berintegritas tinggi. Ia terlibat erat dalam keterlibatan IETA dengan Indonesia terkait pengembangan pasar karbon, termasuk dialog kebijakan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan sektor swasta. Pekerjaannya mendukung pengembangan kerangka pasar karbon yang kredibel untuk memobilisasi investasi, meningkatkan ambisi iklim, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta ekosistem.



Claire Prescott (CDP)

Claire Prescott adalah Head of Sustainable Places di CDP, tempat ia bekerja untuk memajukan aksi lingkungan dan iklim melalui pendekatan penggunaan lahan berkelanjutan dan berbasis wilayah. Ia memiliki pengalaman luas dalam kebijakan lingkungan, manajemen proyek, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan, dengan karier yang mencakup organisasi publik, swasta, dan nirlaba. Peran sebelumnya mencakup pekerjaan di Transparency International, perusahaan energi terbarukan, dan organisasi konservasi. Ia memiliki gelar MSc dalam Global Environmental Politics and Policy dari Birkbeck, University of London, dan BSc dalam Wildlife Conservation dari Liverpool John Moores University.



Eric Natanael (Harapura Impact)

Eric Natanael adalah Direktur di Harapura Impact dan Board Supervisor di Indonesia Impact Alliance (IIA). Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang keberlanjutan dan teknologi, ia telah bekerja di berbagai negara pada persimpangan inovasi lingkungan, kewirausahaan, dan dampak. Pengalamannya mencakup impact investing, strategi keberlanjutan, solusi berbasis teknologi, dan dukungan bagi usaha yang menangani tantangan lingkungan dan sosial. Ia juga terlibat dalam berbagai inisiatif yang mendorong inovasi berkelanjutan, energi bersih, ekonomi sirkular, dan ketangguhan iklim. Melalui pekerjaannya, ia mendukung pendekatan kolaborasi dan investasi yang membantu memperluas solusi berdampak bagi pembangunan berkelanjutan.



Fajri Nailus Subchi (SAMPAN Kalimantan)

Fajri Nailus Subchi adalah Direktur SAMPAN Kalimantan, organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk memperkuat penghidupan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Kalimantan Barat, Indonesia. Ia memiliki pengalaman luas dalam pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, dan pengelolaan hutan serta lahan berkelanjutan. Karyanya berfokus pada perhutanan sosial, konservasi berbasis masyarakat, mitigasi perubahan iklim, dan penghidupan berkelanjutan, termasuk pengembangan agroforestri dan peluang ekonomi berbasis alam. Ia aktif memfasilitasi kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat tata kelola perhutanan sosial, memulihkan ekosistem, dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.



Fakhrizal Nashr (CDP)

Dr. Fakhrizal Nashr adalah Regional Manager, Forests di CDP Asia Pacific. Ia memiliki pengalaman luas dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, pembangunan perdesaan, perencanaan wilayah, dan rantai pasok komoditas berkelanjutan. Karyanya berfokus pada penguatan tata kelola hutan, penggunaan lahan berkelanjutan, serta kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Ia telah melakukan penelitian mengenai keberlanjutan petani kecil kelapa sawit swadaya dan rantai pasok multi-tier di Indonesia, yang berkontribusi pada diskusi mengenai keterlacakan, kesesuaian lahan, dan produksi komoditas berkelanjutan. Ia meraih gelar doktor dalam Perencanaan Perdesaan dan Pembangunan Wilayah dari IPB University serta gelar magister dalam Manajemen Hutan dan European Forestry.



Prof. Farah Diba (Faculty of Forestry, UNTAN)

Dr. Ir. Farah Diba, S.Hut., M.Si., IPU adalah Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura (UNTAN), Indonesia, untuk periode 2025–2029. Ia merupakan akademisi dan peneliti kehutanan dengan bidang keahlian meliputi pengawetan kayu, rayap, dan keanekaragaman hayati. Dalam peran akademik dan kepemimpinannya, ia terlibat dalam penelitian, pendidikan, dan kemitraan terkait pengelolaan hutan berkelanjutan dan konservasi sumber daya alam. Ia juga mendukung kolaborasi antara institusi akademik dan praktisi dalam pengembangan produk hutan berkelanjutan dan pengelolaan hutan yang berorientasi pada masyarakat. Saat ini ia memimpin Fakultas Kehutanan dalam memajukan pendidikan kehutanan, penelitian, dan pembangunan berkelanjutan.

Bertemu **Mitra**



Haryono Hansen Sirait (CDP)

Haryono Hansen Sirait adalah profesional di bidang tata kelola iklim dan pembiayaan berkelanjutan dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di Asia Tenggara. Saat ini ia menjabat sebagai Konsultan di PT Permakultur Lanskap Berkelanjutan, mendukung pendekatan lanskap dan yurisdiksi untuk produksi komoditas berkelanjutan di Indonesia. Sebelumnya, ia memimpin keterlibatan CDP dengan kota, negara bagian, dan wilayah di Asia Tenggara, dengan fokus pada iklim, hutan, dan pengungkapan lingkungan. Ia juga pernah menjabat sebagai Environment Officer di Sekretariat ASEAN, mendukung kerja sama regional mengenai polusi asap lintas batas dan pengelolaan gambut berkelanjutan. Keahliannya mencakup kebijakan iklim, pengungkapan keberlanjutan, tata kelola hutan, dan pembiayaan berkelanjutan.



Herlina Hartanto (Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)

Herlina Hartanto, Ph.D. adalah Direktur Eksekutif dan Ketua Dewan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Indonesia. Sebagai ahli kehutanan dengan pengalaman luas dalam konservasi hutan tropis, ia telah bekerja pada konservasi hutan berbasis masyarakat, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim. Sebelum bergabung dengan YKAN, ia menghabiskan delapan tahun sebagai peneliti di Center for International Forestry Research (CIFOR), melakukan penelitian mengenai hutan tropis dan perhutanan masyarakat. Ia meraih gelar Ph.D. dari Monash University dengan penelitian mengenai ekologi politik kelembagaan hutan adat di Sumatra Tengah. Ia telah menulis lebih dari 20 publikasi dan memimpin upaya konservasi kolaboratif YKAN di seluruh Indonesia.



Juliarta Bramansa Ottay - Perkumpulan Mandala Katalika (MANKA)

Praktisi lingkungan dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dalam konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua dan Direktur Perkumpulan Mandala Katalika (MANKA), dengan fokus pada pembiayaan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, keterlibatan masyarakat, dan kebijakan iklim berbasis lanskap. Sebelumnya, ia memegang posisi kepemimpinan di Borneo Nature Foundation Indonesia, dengan fokus pada konservasi hutan, kemitraan multipihak, dan pemberdayaan masyarakat.



Mikhail Gorbachev Dom, S.Si., M.Si. - Penasihat Teknis Menteri Kehutanan

Mikhail adalah seorang ahli geografi dan praktisi kebijakan lingkungan dengan pengalaman sekitar 20 tahun di bidang penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam, konservasi, dan kebijakan kehutanan. Saat ini, ia menjabat sebagai Penasihat Teknis Menteri Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA). Pengalamannya mencakup penelitian, konsultasi, dan pemberian saran kepada pemerintah terkait kebijakan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan, termasuk mengenai hutan adat, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Bertemu **Mitra**



Robi Ramdani (Olam Agri)

Robi Ramdani adalah Responsible Sourcing Supervisor di Olam Agri, Indonesia. Ia memiliki pengalaman luas dalam rantai pasok berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, dan sertifikasi keberlanjutan, dengan fokus pada sektor kelapa sawit. Pekerjaannya mencakup uji tuntas pemasok, pemantauan perubahan penggunaan lahan dan risiko deforestasi, sertifikasi, pengumpulan data karbon, dan pelaporan keberlanjutan. Sebelumnya, ia bekerja sebagai Sustainability Auditor, mendukung kepatuhan pemasok dan inisiatif sertifikasi, serta sebagai Research Assistant yang berfokus pada penelitian lingkungan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Ia meraih gelar Sarjana Biologi dan Magister Ilmu Lingkungan dari Universitas Padjadjaran.



Asep Andi Yusuf (Wana Subur Lestari)

Asep Andi Yusup, M.Si. menjabat sebagai Manajer Umum Pengelolaan Air di PT Wana Subur Lestari (Sumitomo Forestry Group), Indonesia. Beliau memiliki pengalaman luas di bidang kehutanan, pengelolaan air, dan pengelolaan lahan gambut, dengan fokus pada pengelolaan air berkelanjutan di lahan gambut tropis. Pekerjaannya mencakup pengelolaan tinggi muka air, pemantauan hidrologi, serta dukungan terhadap pengelolaan hutan tanaman dan lahan gambut yang berkelanjutan. Beliau juga telah berkontribusi dalam penelitian dan publikasi mengenai pengelolaan air lahan gambut serta menjadi pembicara di berbagai forum nasional maupun internasional terkait pengelolaan lahan gambut dan perubahan iklim.

Organized by

GCF task force

BATARI Yayasan Bumi Eka Lestari

UCLA School of Law Emmett Institute on Climate Change & the Environment

Supported by

Forests People Climate

Norad

NICFI Norway's International Climate and Forest Initiative

CDP

monka Mandala Hatalika

harapura

NAWASENA Ininnawa Nusantara

Media Partner

Kmedia trusted connected

KOMPAS.id Amanat Hati Nurani Rakyat

Tribunnews.com Mata Lokal Menjangkau Indonesia

LESTARI

KOMPAS.com Jernih Melihat Dunia

KOMPAS TV Independen | Terpercaya

Kontan.co.id

GCF task force
Technical Exchange
West Kalimantan - Indonesia | September 2026

KALIMANTAN BARAT
INDONESIA

Terima Kasih!

THANKYOU!

Jika memerlukan informasi lainnya, jangan sungkan untuk menghubungi team kami

